

**EKONOMI POLITIK PALEMBANG SULTAN
MAHMUD BADARUDDIN II PERIODE KEKUASAAN
(1804-1812)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik

OLEH

Imroatul Azizah

1657020047

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Hal :Pengajuan Sidang Munaqosah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dan kami periksa serta diadakannya perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul judul "**Ekonomi Politik Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Periode Kekuasaan (1804-1812)**" yang ditulis oleh saudara Imroatul Azizah (1657020047) telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Walaikumussalam Wr.Wb

Palembang, Juli 2021

Pembimbing I



Taufik Akhyar, M.Si

NIP. 19710913200031003

Pembimbing II



Marivatu Obitiah, MA, Si

NIDN. 2011049001

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Imroatul Azizah
Nim : 1657020047
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Ekonomi Politik Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Periode Kekuasaan (1804-1812)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Kamis / 05 Agustus 2021
Tempat : Di Rumah Via *Online (daring)* melalui Aplikasi Zoom.

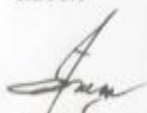
Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 20 Agustus 2021

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

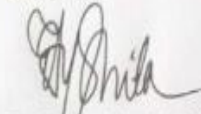
KETUA


Taufik Akhyar, M. Si
NIP. 197109132000310033

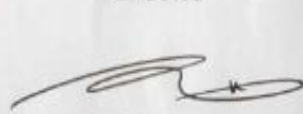
SEKRETARIS


Reagen Harahap, MA
NIDN. 2016028804

PENGUJI 1


Dr. Ed Yusnita, S.Ag M.Hi
NIP. 197409242007012016

PENGUJI 2


Ryllian Chandra, MA
NIP. 198604052019031011

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan diawah ini :

Nama : Imroatul Azizah
Tempat Tanggal Lahir : Gading Raja, 03 Agustus 1997
Nim : 1657020047
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Ekonomi Politik Palembang Sultan Mahmud
Badaruddin II Periode Kekuasaan (1804-1812)

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dan mendapatkan gelar Strata 1 di UIN Raden Fatah Palembang
2. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi

Palembang, 19 Juli 2021



Imroatul Azizah
1657020047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Innaullohamaashobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berusaha dan berdoa untuk kesuksesanku, ketika dunia menutup pintunya pada saya, Bapak dan Mamak membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang mencibir saya mereka menutup telinga untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku dan selalu berusaha menguatkan ku di setiap keadaan. Terima kasih karena selalu ada untukku Bapak Riduan dan Ibu Ma'Rifah.
2. Saudaraku tersayang Nia Anisa Dela dan Muhammad Azril Al Fatih yang telah memberikan motivasi dan berdoa untuk kesuksesan diriku.
3. Temanku (Fitiani, AMAK) terima kasih atas dukungan, dan selalu memberikan motivasi untuk kebaikan ku.
4. Pembimbingku Bapak Taufik Akhyar, M.Si dan Ibu Mariyatul Qibtiyah, MA.Si yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendukung selesainya skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ainur Rofik, M.Si.
6. Sahabat seperjuangan (Herlin Meiviani, Indah Sari, M Iqbal Refindo, Kurniawan, Hari Febriansyah, M Shandika Putra, Jodi Apriansyah Serta Teman-teman Kelasku Ilmu Politik B)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Ekonomi Politik Palembang Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin II (Periode Kekuasaan 1804-1012)” .Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Ekonomi politik Palembang pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu hasilnya Kesultanan Palembang masih mendapatkan persaingan dari Cina dan Kesultanan Riau serta mendapatkan penghasilan kecil dari penjualan semua produk-produk memiliki harga yang rendah sebagaimana yang sudah di tetapkan oleh pihak Kolonial Belanda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Adam Smith yaitu teori tentang nilai kerja yang berangkat dari individu dan kebutuhannya, lalu tentang masyarakat dan negara. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan kajian Literatur. Tehnik pengumpulan data yaitu melalui Peneltian pustaka (*Library Research*), Mengakses situs internet (*website*) dan Dokumentasi. Hasil dari Penelitian ini Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian pada saat itu, setiap keputusan yang diambil oleh Sultan Mahmud Badaruddin wajib mentaati setiap keputusan yang diambil, agar dapat mensejahterakan masyarakat, semua produk-produk yang berasal dari petani ataupun pertambangan Timah dan lada harus mendapatkan persetujuan dari Sultan Mahmud Badaruddin untuk penjualan produk yang di dihasilkan. Terkait dengan ekonomi politik, Kesultanan Palembang juga mendapatkan tekanan dari kolonial Belanda yang mana sudah di sepakati oleh kedua belah pihak untuk produk-produk dari Kesultanan Palembang seperti Timah dan Lada harus di jual pada pihak kolonial Belanda dengan harga yang murah. Akibatnya perekonomian pada saat itu tidak stabil dan memicu kesenjangan antara Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda. Kesepatanan antara Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda juga menimbulkan pergolakan politik, karena pada saat itu monopoli yang terjadi atau yang coba di terapkan oleh VOC tampaknya bukan monopoli murni, pada kenyataan nya Kesultanan Palembang masih mendapatkan persaingan dari Cina dan Kesultanan Riau serta mendapatkan penghasilan kecil dari penjualan semua produk-produk memiliki harga yang rendah sebagaimana yang sudah di tetapkan oleh pihak Kolonial Belanda.

Kata Kunci : SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, Ekonomi Politik, Teori Adam Smith.

ABSTRACT

The title of this research is "Palembang Political Economy In The Time Of Sultan Mahmud Badaruddin II (Period Of Power 1804-1012)". The purpose of this study is to determine the political economy of Palembang during the reign of Sultan Mahmud Badaruddin II. and earn a small income from the sale of all products at low prices as set by the Dutch Colonial. The theory used in this research is Adam Smith's theory of the value of work that departs from the individual and his needs, then about society and the state. This research method is descriptive qualitative research method with literature review. Data collection techniques are through library research, accessing internet sites (websites) and documentation. The results of this study Sultan Mahmud Badaruddin II had an important role in running the economy at that time, every decision taken by Sultan Mahmud Badaruddin was obliged to obey every decision taken, in order to prosper the community, all products originating from farmers or Tin mining and pepper must obtain approval from Sultan Mahmud Badaruddin for the sale of the products produced. Related to the political economy, the Palembang Sultanate was also under pressure from the Dutch colonials, which both parties agreed that products from the Palembang Sultanate such as Timah and Pepper had to be sold to the Dutch colonial parties at low prices. As a result, the economy at that time was unstable and triggered a gap between the Sultanate of Palembang and the Dutch Colonial. The agreement between the Sultanate of Palembang and the Dutch Colonial also led to political upheaval, because at that time the monopoly that was happening or what the VOC was trying to implement did not seem to be a pure monopoly, in fact the Sultanate of Palembang still had competition from China and the Sultanate of Riau and earned a small income from sales. all products have low prices as set by the Dutch Colonial.

Keywords: *SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, Political Economy, Adam Smith's Theory.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan disetiap kesulitan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dengan judul **“Ekonomi Politik Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Periode Kekuasaan (1804-1812)”** Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Rylia Chandra Ekaviana, MA. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Taufik Akhyar, M.Si, sebagai dosen pembimbing I skripsi saya
9. Ibu Mariyatul Qibtiyah, MA.Si sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
10. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang..

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, Agustus 2021

Imroatul Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAGAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Perspektif Ekonomi Politik.....	19
B. Sistem Kesultanan Dalam Tata Negara Islam Melayu.....	23
C. Sistem Perdagangan Abad ke-19.....	26

BAB III PROFIL KESULTANAN PALEMBANG

A. Sejarah Kesultanan Palembang	31
B. Sosial Kemasyarakatan.....	35
C. Perekonomian Kesultanan Palembang	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sultan dalam Perekonomian Palembang	47
B. Kondisi Politik Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin II....	51
C. Ekonomi Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin II	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA.....71

DAFTAR BAGAN

Silsilah Kekerabatan Kesultanan Palembang	41
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara secara historis sangat memperlihatkan perkembangan sejarah yang sangat panjang dan menjadi tempat munculnya salah satu pusat peradaban besar dan tua di Nusantara. Palembang menjadi ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam dari tahun 1553-1814. Masa Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Masyarakat yang bermukim di Palembang yang merupakan bekas pusat Kemaharajaan Sriwijaya (kemudian berubah menjadi Kerajaan Palembang di zaman Demang Lebar Daun dan Sapurba, lalu menjadi takluk di Singasari, Majapahit dan Demak Islam) yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Islam Palembang, adalah penutur bahasa Melayu dari dahulu sampai sekarang. Sebagaimana halnya di Kerajaan Jambi Tua, bahasa melayu mulai berkembang di kawasan ini sejak periode bahasa Melayu kuno (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016:15).

Awal kesultanan Palembang Darussalam itu baru dimulai pada masa Pangeran Ario Kesumo yang memutuskan hubungan Palembang dengan Mataram dan Pangeran Ario Kesumo ini pula yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Ario Kesumo adalah Sultan Palembang yang pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam memerintah dari tahun (1659-1706 M). Ario Kesumo ini dikenal juga Ario Kesumo Kemas Hindi yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imamdandan Ario Kesumo ini di kenal juga dengan Candi Walang. Pangeran Ario Kesumo Kemas Hindi memproklamirkan Palembang

menjadi Kesultanan Palembang Darussalam serta mendapat legalitas pula dari kerajaan Istanbul (Turki Usmani) (Farida, 2012:17 dalam Ilham 2015 : 24).

Setelah Sultan Mahmud Badaruddin I wafat maka Ia digantikan oleh anaknya yang bernama Pangeran Adi Kusumo menjadi Sultan dengan menyandang gelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo (1758-1776 M). Beberapa tahun sebelum berpulang nya ke rahmatullah, Sultan Ahmad Najamuddin menobatkan putranya yang sulung Mahmud Badaruddin mejadi penggantinya dengan gelar Sultan Muhammad Bahauddin, dengan maksud untuk memberikan bimbingan yang luas kepada putranya tersebut. Sultan Mahmud Badaruddin (1776-1803 M), mempunyai anak bernama Raden Muhammad Hasan dan adiknya Raden Muhammad Husin.

Setelah Muhammad Bahauddin wafat digantikan oleh anaknya yang sulung bernama Raden Muhammad Hasan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821 M). Sultan Mahmud Badaruddin II (menurut kesaksian dari pihak lawan dan kawan) adalah seorang yang bermartabat luhur, agung dan sifat-sifatnya yang baik, oleh sebab itu kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II dilukiskan oleh teman semasanya sebagai seorang penguasa Timur yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, dan seorang yang cerdas terpelajar, seorang organisator yang baik, seorang diplomat yang licik dan cerdas, serta seorang ahli di bidang pertahanan yang pintar dan cekatan dan juga senang dengan ilmu sastra.

Selain kepemimpinanya berani, bijaksana, kesatria dan cekatan, Sultan Mahmud Badaruddin II juga berperan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam, di mana Sultan berperan sebagai pemimpin yang wewenang kekuasaan pemerintahan

sepenuhnya dipegang oleh Sultan yang bertindak sebagai kepala eksekutif sekaligus kepala keagamaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harian pemerintahan (Akib,1976:36 dalam Evianti, 2017:12).

Sejak awal masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II telah bercita-cita akan masa depan negaranya yang lepas dari cengkraman pemerintah belanda. Oleh karena itu sultan mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari pengaruh Kolonial belanda. Keberanian Sultan Mahmud Badaruddin II untuk tidak mengakui kekuasaan belanda dan inggris serta melakukan pengusiran orang-orang belanda dari Palembang dengan melakukan penyerbuan ke loji sungai Aur. Loji sungai Aur sendiri kemudian dibakar. Peristiwa penyerbuan loji ini dikenal dengan nama peristiwa loji sungai Aur (Yusuf 2006:12 dalam Ilham, 2015:56).

Sejak peristiwa penyerbuan ke loji sungai aur berakhir pula kekuasaan belanda di Palembang. Sejak itu perekonomian berangsur membaik, Perekonomian kesultanan Palembang dapat dilihat dari letak kesultanan ini berada, di mana perekonomian nya sangat di pengaruh oleh perdagangan dari dalam dan luar negeri. Perdagangan timah dan lada yang digerakkan para Sultan Palembang di bawah monopoli VOC sepertinya tidak bisa begitu saja diartikan sebagai bisnis yang lemah di bawah kendali pihak monopoli dengan balasan berupa proteksi. Karena dalam praktiknya, sistem monopoli perdagangan timah dan lada mengalami proses negosiasi yang di inisiatif oleh Sultan Palembang (Rochmiatun, 2015).

Proses negosiasi tersebut di antaranya berkenaan dengan masalah peningkatan harga komoditas dan premi yang diperoleh. Proses negosiasi yang dilakukan Sultan ini ternyata memiliki kekuatan yang

cukup kuat. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dari isi kontrak-kontrak yang dilarang tersebut kemudian bisa mendapatkan izin, antara lain adalah berkenaan dengan membuka hubungan dagang dengan Siam dan Kamboja serta tidak terganggunya kondisi keamanan bagi Sultan Palembang dan para pedagang Melayu lainnya ketika berdagang dengan para pedagang non VOC, seperti pedagang dari Macao, Portugal, Perancis, Inggris, dan Cina. VOC memang secara resmi memiliki kuasa tertinggi di Palembang, akan tetapi dalam praktiknya kedaulatan tetap berada di tangan Sultan Palembang, Sultan Muhammad Badaruddin II (Rochmiatun, 2015:378).

Untuk mengetahui kondisi perdagangan dan ekonomi politik pada era Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dapat kita ketahui dari naskah surat-surat dagang dan naskah diplomatik. Pada masa periode masa Sultan Mahmud Badaruddin II geliat ekonomi di Palembang terasa meningkat, Sultan Mahmud Badaruddin menjalankan diplomasi dengan menjalankan hubungan awal yang baik antara dirinya dan Gubernur Jenderal.

Awal dari kerja sama ini adalah berupaya untuk saling melindungi kepentingan masing-masing pihak yaitu keuntungan ekonomi yang mana Palembang menjamin ketersediaan lada dan timah, tetapi Palembang juga meminta perlindungan dari pemerintah kolonial untuk melindungi kepentingan Palembang dari ancaman pihak-pihak luar yang berusaha untuk mengganggu kerja sama ini.

Hasil yang dicapai dalam diplomasi politik ini dapat dikatakan berhasil di karena kan Sultan Mahmud Badaruddin telah menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan dan juga kerja sama dan perniagaan timah dan lada yang dilakukan oleh kedua pihak dapat berjalan lancar dan aman (Ilham, 2015:156).

Berdasarkan uraian disampaikan maka peneliti akan membahas ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II dalam periode 1804-1812.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di paparkan maka peneliti telah merumuskan suatu masalah sebagai berikut “*Bagaimana ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin periode kekuasaan 1804-1812* “. penelitian ini di fokuskan pada peneliti mengenai ekonomi politik yang terjadi pada saat itu.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi politik yang dilakukan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin. Hal ini penting untuk diketahui dikarenakan belum ada literatur yang meneliti tentang masalah ini. Dengan melakukan analisis terhadap masalah ini maka peneliti dapat memberikan sumbangan kepala penelitian-penelitian mengenai Kesultanan Palembang. Mengangkat kembali Sejarah di Kesultanan Palembang dan menjelaskan secara Deskriptif ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teori penelitian ini di harapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik khususnya tentang kajian masalah ekonomi politik pada masa Kesultanan Mahmud Badaruddin periode kekuasaan 1804-1812.
2. Kegunaan teori Praktis Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan dapat

memberikan wawasan tentang ekonomi politik pada masa Kesultanan Mahmud Badaruddin periode kekuasaan 1804-1812.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya Peneliti melakukan tinjauan dan menemukan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, yang memiliki kesamaan pada fokus yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis, yang ditulis dalam bentuk ringkasan.

Pertama, Muhammad Ilham "*Diplomasi politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda berdasarkan surat-surat melayu abad ke 19*". Skripsi program studi keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Kesimpulan yang didapatkan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik pada skripsi ini, antara lain sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kajian dari data diplomasi merupakan sebuah hubungan persahabatan yang saling terikat antar negara atau institusi pemerintahan dengan menjalin berbagai bidang penting dalam pemerintahan terutama bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Berdasarkan hubungan yang terjalin antara Kesultanan Palembang dengan Kolonial Belanda terdapat tipe-tipe diplomasi yang menarik untuk diteliti. Apabila dilihat dari kajian naskah yang telah ditransliterasikan maka Kesultanan Palembang hanya menggunakan dua jenis diplomasi politik yaitu Secret Diplomacy dan Market Diplomacy. Dalam beberapa surat perjanjian antara Kesultanan Palembang dan Pemerintah Belanda hubungan yang terjadi memang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Dalam perdagangan inilah antara Palembang dan Belanda menjalin hubungan persahabatan yang saling menguntungkan.

Hubungan perdagangan ini yang menyebabkan masing-masing pihak saling bergantung, yang mana Kesultanan Palembang

menyediakan komoditas lada dan timah yang mahal dijual dipasaran, dan Belanda memberikan keuntungan yang luar biasa dan juga perlindungan keamanan bagi Kesultanan Palembang. Dalam perundingan antara masing-masing pihak biasanya dikuatkan dengan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis inilah yang biasanya mengandung berbagai macam unsur dalam persahabatan kedua belah pihak, bisa saja tentang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, bea cukai dan berbagai macam hal yang menyangkut kepentingan antara Kesultanan Palembang dan Pemerintah Belanda. Berbagai macam laporan dan perjanjian yang telah disepakati, biasanya akan di simpan dan di arsipkan oleh masing-masing pihak.

Tujuannya adalah agar surat perjanjian ini dapat dibahas dan dibaca kembali apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dan perjanjian ini biasanya di kategorikan perjanjian atau pertemuan tingkat tinggi yang hanya di hadiri oleh para bangsawan dan pejabat penting Kolonial Belanda. Dengan merujuk kepada ke semua data terjemahan surat-surat Melayu maka, dapat dilihat dan digambarkan bahwa hubungan antara Kesultanan Palembang dan Pemerintah Belanda berjalan dengan baik dengan berbagai macam tujuan baik hubungan ekonomi maupun politik. Tetapi perlu ditekankan bahwa kesemua isi surat ini lebih menekankan pada aspek hubungan politik dan ekonomi.

Dari isi surat-surat yangtelah diterjemahkan inilah, dapat dilihat bahwa hubungan ini mengandung unsur-unsur diplomasi antara kedua belah pihak, tipe-tipe diplomasi apa yang digunakan dan juga dalam diplomasi yang dilaksanakan akan terlihat alasan dan tujuan diplomasi yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka metode yang

digunakan adalah kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan teori ekonomi politik dalam penelitian ini yang berjudul ekonomi politik kesultanan Sultan Mahmud Badaruddin II periode 1814-1812.

Kedua, Endang Rochmiatun, 2015 "Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kualifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode konteks analisis digunakan untuk menemukan makna isi cerita yang terdapat dalam objek penelitian. Secara teknis metode ini mencakup identifikasi, klasifikasi, interpretasi dan kesimpulan. Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa Perdagangan timah dan lada yang digerakkan para Sultan Palembang di bawah monopoli VOC sepertinya tidak bisa begitu saja diartikan sebagai bisnis yang lemah di bawah kendali pihak monopoli dengan balasan berupa proteksi. Karena dalam praktiknya, sistem monopoli perdagangan timah dan lada mengalami proses negosiasi yang di inisiatif kan oleh Sultan Palembang.

Proses negosiasi tersebut di antaranya berkenaan dengan masalah peningkatan harga komoditas dan premi yang diperoleh. Proses negosiasi yang dilakukan Sultan ini ternyata memiliki kekuatan yang

cukup kuat. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dari isi kontrak-kontrak yang dilarang tersebut kemudian bisa mendapatkan izin, antara lain adalah berkenaan dengan membuka hubungan dagang dengan Siam dan Kamboja serta tidak terganggunya kondisi keamanan bagi Sultan Palembang dan para pedagang Melayu lainnya ketika berdagang dengan para pedagang non VOC, seperti pedagang dari Macao, Portugal, Perancis, Inggris, dan Cina. VOC memang secara resmi memiliki kuasa tertinggi di Palembang, akan tetapi dalam praktiknya kedaulatan tetap berada di tangan Sultan

Palembang. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menghasilkan temuan yang didapat dengan di bantu naskah dagang dan naskah diplomatik dagang.

Ketiga, Nyimas Umi Kalsum (2017) "Tradisi penyalinan naskah islam Palembang ditinjau dari perspektif ekonomi" Skripsi Program Program Doktor Studi Sejarah Peradaban Islam Konsentrasi Islam Melayu Nusantara Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang Studi. Menggunakan metode kualitatif dapat memberi hasil penelitian data deskriptif. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan cara pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data.

Fokus analisis dari naskah. Analisis ini juga telah digunakan untuk mencari data frekuensi, melainkan untuk menganalisis data yang tampak, sehingga analisis ini digunakan untuk memahami fakta. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai pengumpul data baik dibantu

orang lain atau pun sendiri sehingga menjadi lebih baik. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dapat memberi hasil penelitian data deskriptif analisis untuk mengumpulkan data yang di peroleh. Sedang metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data di sertakan naskah dagang dan naskah diplomatik dagang.

Keempat, Indri Safira (2017) "*Sejarah perekonomian kota Palembang : masa pemerintahan kolonial belanda, 1825-1942*" Skripsi Program Studi sejarah dan kebudayaan islam UIN Raden Fatah Palembang. Hasil Peneliti ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Dari beberapa penelitian dan kajian yang telah ada sebelumnya, maka belum ada yang Hasil Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif .

Dari penjelasan di atas bahwa sebelum kedatangan bangsa barat, Kota Palembang sejak dahulu telah menjadi bandar perdagangan di Nusantara. Kekuasaan saat itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal akan emas, sutera serta komoditas lain nya. Melalui jalur perdagangan itulah berkembang agama Islam. Para pedagang India, Arab, Persia, Cina dan bangsa lain nya melakukan proses jual beli di Sungai Musi.

Sehingga pada saat itu berkembanglah agama Islam pada awal abad ke-17. Sejak saat itu terbentuklah perkampungan Islam dan kekuasaan Islam. Kerajaan Palembang terlebih dahulu berkembang di mana komoditas perdagangan yang diwariskan masa Sriwijaya. Sedangkan pada masa ini kontak dagang pertama VOC menjalin kerja sama dengan Sedo Ing Kenayan tahun 1917.

Metode penelitian yang digunakan peneliti yang dapat memberikan hasil peneliti ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dalam judul Sejarah perekonomian kota Palembang : masa

pemerintahan kolonial belanda, 1825-1942. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan pengumpulan data dengan teori ekonomi politik dalam penelitian yang berjudul ekonomi politik kesultanan sultan Mahmud Badaruddin II periode 1804-1812.

F. Kerangka Teori

Pemikiran ekonomi politik

Zaman Yunani Kuno (atau setidaknya dalam karya Aristoteles, *Politics*), ekonomi merupakan bagian dari studi politik yang pada gilirannya menjadi bagian dari penelaahan etika dan filosofi. Awalnya ekonomi dianggap sebagai seni manajemen domestik di mana lewat perluasan nya berkembanglah makna paling awal ekonomi politik, merujuk pada seni mengelola ekonomi sebuah Negara (Staniland dan Martin. 2003:16)

Ekonomi politik pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith. Diikuti oleh David Richardo ia teori apa yang kemudian dikenal dengan teori nilai kerja. Selain teori tentang nilai kerja Adam Smith berangkat dari individu dan kebutuhannya, lalu tentang masyarakat dan negara. Perumusan ini kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dengan teori nilai lebihnya dan konsep cara produksi. Karl Marx memperbaiki apa yang dianggap sebagai perumusan yang belum selesai dari Adam Smith.

Buku utama yang ditulis oleh Adam Smith yang berjudul *The Wealth of Nations* (terbit tahun 1778) bertitik tolak dari hubungan sosial antar manusia. Buku ini lalu menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan civil society. Smith adalah yang pertama kali menyusun sebuah sistem yang padu tentang komoditas, pembagian kerja, nilai, modal serta kerja sederhana dan kompleks. Ia sistem pertama kali

semua hal itu menjadi teori nilai kerja ia juga menjelaskan hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. (Mahmudi, 2013:5).

Ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Satu hal yang jarang diungkapkan adalah bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Kalau politik dibedakan dari ekonomi, itu tidak berarti bahwa keduanya benar-benar terpisah sepenuhnya, terisolasi dari yang lain atau tidak peduli terhadap yang lain. Dan juga itu tidak berarti bahwa politik dan ekonomi tidak saling dipengaruhi satu sama lain atau “terjadi” dalam struktur konkrit yang sama. Contoh alokasi barang dan jasa terjadi dalam struktur pasar dan struktur politik (Caporaso dan Levine, 2015:1-2)

Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricard.

Teori Marxian lebih di fokus kan pada proses-proses reproduksi yang bersifat objektif ini dan tidak di fokus kan telaah nya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu. Dalam teori neo klasik, individu memiliki kepentingan untuk maksimalkan kesejahteraan mereka di mana kesejahteraan ini di definisikan berdasarkan peringkat keinginan mereka. Maka hubungan sebab akibatnya adalah individu sebagai penyebab, di mana kepentingan individu ini bersifat subjektif, dan struktur ekonomi sebagai akibat (Caporaso dan Levine, 2015:125).

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian melibatkan kerangka teori dan pembelajaran teknik yang dapat digunakan dalam penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis. Dilihat dari tujuan metode penelitian bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi dan problem penelitian. (Roikon,2019). Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian.

1. Pendekatan / Metode Penelitian

Penelitian kepastakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian terlebih terdahulu. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi melalui kajian literatur. Menurut Afifuddin (2012) Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *kontak review*, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan mana pun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan, berkaitan dengan penulis di dalam penelitian ini, tentang ekonomi politik Palembang sultan Mahmud Badarudin periode 1804-1812.

2. Data dan Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah data kualitatif. Sumber data yang di subjek dari mana data dapat diperoleh.

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang didapat dari sumber pertamanya adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari terdahulu berupa literatur yang berkaitan dengan Sultan Mahmud Badaruddin II periode 1804-1812 dalam buku Kesultanan Palembang Darussalam.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data primer. Adapun sumber dari data sekunder berupa buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II periode 1804-1812.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Teknik kepastakaaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian di saring dan di tuangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II periode Kekuasaan 1804-1812.

2. Mengakses situs internet (*website*)

Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badarudin II periode Kekuasaan 1804-1812 dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori yang sedang penulis teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi serta naskah dagang dan naskah diplomatik dagang pada masa Sultan Muhammad Badaruddin II periode 1804-1812.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang di nyatakan oleh respponden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, duteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisi dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis

deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap suatu peristiwa tersebut (Noor, 2011:37).

H. Sistematika Penulisan

Laporan Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan dalam penelitian ini diperlukan sistematika penulisan yang di mana isinya adalah bagian-bagian penulisan yang dibuat per masing-masing bab dan dituliskan secara ringkas, yakni:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sedikit gambaran dan penelitian tersebut. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

BAB II Kajian Teori Yang Relevan

Pada bagian bab ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bab ini harus dibedakan dengan Kerangka Teori di Bab I. Bab II lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teori tentang fokus masalah yang diangkat. Yang di dalamnya terdapat Perspektif ekonomi politik, sistem ke tata negaraan islam melayu, sistem perdagangan abad ke 19.

BAB III Profil Kesultanan Palembang Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin II

Bab ini berisi pembahasan untuk mengenal sasaran objek yang diteliti. Yang terdiri dari gambaran umum tentang kesultanan Sultan Muhammad Bahaudin II. Di dalamnya terdapat Gambaran umum kota Palembang, sejarah kesultanan Palembang, stratifikasi social masyarakat Palembang, perekonomian Kesultanan Palembang.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab ini merupakan hasil dari pemikiran, bab ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada secara sistematis dan ilmiah. Di dalam terdapat peran Sultan dalam perekonomian Palembang, kondisi politik pada masa Kesultanan Palembang, analisis ekonomi pada masa Kesultanan Palembang.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil keseluruhan dari penelitian tersebut dalam bentuk kesimpulan dan ditambah dengan saran-saran, dan disertai daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

A. Perspektif Ekonomi Politik

Istilah “ekonomi politik” yang digunakan dalam teori Marxiam tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang di dasarkan pada metode dan teori dari pemikiran-pemikiran ekonomi klasik terutama, Adam Smith dan David Ricardo (Caporaso dan Levine, 2015:124)

Teori Marxiam lebih di fokuskan pada proses-proses reproduksi yang bersifat objektif ini dan tidak di fokuskan telaah nya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu. Dalam teori neo-klasik, individu memiliki kepentingan untuk di maksimalkan kesejahteraan mereka di mana kesejahteraan ini di definisikan berdasarkan peringkat keinginan mereka. Maka hubungan sebab akibatnya adalah kepentingan individu sebagai penyebab, di mana kepentingan individu ini bersifat subjektif, dan struktur ekonomi menjadi akibat (Caporaso dan Levine, 2015:125)

Penafsiran Marxiam terhadap hubungan antara ekonomi dengan politik dilandaskan pada ide kepentingan ekonomi dan peranan dari kepentingan ekonomi itu di dalam mendefinisikan agenda politik. Dengan munculnya ide ini sekarang akan membahas tentang pandangan Marxiam tentang kepentingan.

1. Bahwa kepentingan muncul karena adanya struktur dari produksi. Apa yang menjadi kebutuhan dari individu akan

ditentukan oleh dimana posisi individu itu di dalam proses produksi sosial.

2. Kepentingan pribadi dari seorang individu dapat di ketahui dengan melihat pada kelas mana individu itu berada.
3. Kepentingan kelas yang satu akan bertentangan dengan kepentingan kelas yang lain. Tingkat sejauh mana sebuah kelas tertentu berhasil mencapai kepentingannya akan sekaligus menentukan seberapa besar kelas yang lain mengalami kegagalan dalam mencapai kepentingan.
4. Kepentingan kelas terbentuk dalam sistem produksi akan menjadi kepentingan politik, yaitu pertarungan untuk merebut kan kekuasaan Negara.

Teori Marxiam menyatakan bahwa perekonomian pasar bukanlah mekanisme untuk di maksimal kan kesejahteraan pribadi dari individu-individu di dalamnya melainkan sebuah sarana untuk di fasilitas para kapital untuk merampas (*appropriation*) nilai surplus dan mengakumulasi kan kapital. Pasar memang dapat berfungsi sebagai institusi sosial karena memungkinkan semua individu untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri dan mengumpulkan kekayaan pribadi dalam bentuk kapital (Deliarnov, 2006:30).

1. Ekonomi Politik dalam Lintasan Sejarah

Ekonomi politik sudah menjadi bahasan pada masa yunani kuno yang semakin berkembang pada abad ke-14. pada abad terjadi Revolusi Prancis, era kaum saudagar atau *merchant* berkuasa dikarenakan kemungkinan transisi kekuasaan dari raja dan gereja, sehingga era ini disebut merkantilisme (Deliarnov, 2006:22 dalam Fauzi, 2019: 156)

Aliran pertama yang ada campur tangan negara dalam perekonomian ialah mekanisme. Banyak cara campur tangan negara dalam perekonomian, seperti memberi fasilitas industri baru, monopoli dagang, dan pengenaan pajak impor. Hal yang sedemikian ini bertujuan untuk memperbesar surplus, agar negara semakin jaya. Di sisi lain, campur tangan negara hanya bisa dinikmati oleh kalangan pengusaha yang berkolaborasi dengan jajaran penguasa (Deliarnov, 2006:23 dalam Fauzi, 2019: 156).

Kaum fisiokrat menganggap kelas produksi yang terdiri dari petani, ladang dan yang bergerak dalam usaha tambang merupakan pahlawan kemakmuran. Dalam era mekanisme, petani harus membayar pajak tinggi dan pungutan liar. Kaum petani yang tidak terima akan melawan kelompok saudagar. Hal semacam ini, Francois Quesney sebagai bahaya latin dan sampailah puncaknya pada akhir abad ke-18.

Kaum fisiokrat meminta aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah, dengan meminta monopoli serta kemudahan sekelompok orang dihapuskan dan tidak ada lagi sekat dalam perdagangan bebas yang gagasan oleh Adam Smith dengan mendasarkan pada prinsip *laissez faire laissez passer* (Deliarnov, 2006:23 dalam Fauzi 2019:156).

2. Ekonomi Politik Dalam Tradisi Klasik

Para pemikir ekonomi klasik di abad XVIII dan XIX adalah yang pertama kalinya menggunakan istilah “ekonomi politik” (*politik ekonomi*). Maka periode klasik dalam ekonomi politik ini dimulai sejak terbitnya buku *wealth of nation* karya Adam Smith (1776) sampai terbitnya buku *prinsip of politik ekonomi* karya John S. Mil (1848). Bagian pertama ini membahas tentang sifat

dari sistem pasar dan hubungan antara pasar dan Negara. Kedua membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Bagian kedua ini lebih banyak mengambil dari kontribusi-kontribusi terbaru di masa modern yang masih menggunakan pendekatan klasik (Caporaso dan Levine, 2015: 69).

Para pemikir ekonomi politik dari ekonomi klasik mengajukan dan menguraikan secara terperinci dua ide utama, yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi adalah bidang yang lebih penting dari pada yang lain. Adam Smith memandang kebangkitan masyarakat sipil sebagai dampak dari perilaku pencarian laba dan bukan sebagai akibat dari perencanaan yang dibuat dan dirancang oleh proses politik atau kewenangan publik apa pun. Sedangkan Konsep sejarah dari Marx yang materialis menekankan dengan kuat bahwa politik dan keputusan-keputusan dari kewenangan publik adalah tunduk pada faktor-faktor yang tidak dapat ditolak yang terjadi dalam masyarakat. Kebangkitan ilmu ekonomi politik sekaligus menandai menurunnya posisi-posisi kalangan politik dan bangkitnya kalangan non-politik dalam masyarakat (Caporaso dan Levine, 2015:72)

Steuart memaparkan ide penting. Yang pertama dia mengajukan sebuah pandangan perubahan sudah terjadi karena faktor-faktor dan proses-proses yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan bukan terjadi karena kehendak Negara. Kedua steuart mengatakan bahwa Negara tetap memiliki peranan penting, yaitu Negara harus mengakui bahwa perubahan-perubahan memang harus terjadi dan kemudian Negara membimbing masyarakat di dalam menjalani perubahan-perubahan itu. Karena tugas dari

Negara adalah mendidik individu agar menyadari apa sebenarnya yang dapat menguntungkan bagi kepentingan mereka, baik itu kepentingan dalam artian pribadi maupun publik (Caporaso dan Levine, 2015:74).

B. Sistem Kesultanan Dalam Tata Negara Islam Melayu

Melayu merupakan negeri yang pernah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha zaman Melayu Islam merupakan faktor utama berlakunya berbagai-bagai perubahan dalam institusi kesultanan di Tanah Melayu. Walaupun kedatangan Islam telah mengubah nilai-nilai hidup masyarakat Melayu, sebagian besar nilai-nilai tradisional masih terus menguasai pemikiran dan corak kehidupan mereka.

Konsep politik berhubung dengan Dewa-Raja yang telah tertanam dengan kuat dalam kepercayaan dan mental tradisi tidak mudah untuk dikikis dengan cepat. Malah di atas landasan kepercayaan kerohanian yang diwarisi turun temurun itu berterus di zaman Islam. Cuma disesuaikan dengan doktrin kepemimpinan dalam Islam. Raja Islam yang memerintah tidak lagi dikaitkan hubungan batiniah nya dengan para dewa tetapi di hubung kaitkan pula dengan Allah dan Rasulullah serta tokoh para *awliya'* dan *anbiya'*.

Oleh itu lahirlah pula berbagai -bagai konsep dan istilah baru yang datang dari ajaran Islam dan dikaitkan pula dengan konsep kerajaan di Alam Melayu. Buktinya dengan kedatangan agama Islam, status raja-raja Melayu diturunkan dan kini hanya menjadi bayangan Tuhan di dunia (Habiburrahman, 2016:94).

a) Tata Negara kesultanan Palembang.

Kesultanan Palembang lebih bercorak islam karena menerapkan syariat islam serta menjadikan Alquran dan hadis

sebagai konstitusi pemerintahan. Kekuasaan yang di terapkan meletakkan tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat di kesultanan ini. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah pedalaman atau dikenal dengan istilah *raban* dan *jenang*.

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dituangkan dalam bentuk *piagem* (piagam), yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah yang masuk dalam pengaruh kekuasaan Palembang, seperti Bangka, Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembes), Bengkulu (Kepahiang /Rejang) dan Lampung (Tulang Bawang/Mej) (Syawaludin, 2014:145).

b) Sistem Pemerintahan di Kesultanan

Raja dianggap sebagai ganti atau wakil tuhan di dunia ini. Dalam ungkapan bahasa Arab ia disebut dengan berbagai-bagai istilah seperti *zallulLah fi al-'alam*, *zallulLah fi al-ard* dan *khalifah al-mu'minin*. Risalah Hukum Kanun Melaka. Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kuasa. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada kewenangan yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenangannya tersebut disalurkan untuk menggerakkan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki.

Sekiranya ada undang-undang yang diamalkan dalam kerajaannya, raja boleh mengatasi undang-undang tersebut. Raja yang memerintah itu sendiri sebenarnya undang-undang. Oleh itu

raja dan kerajaan adalah sinonim, sebab dari segi ideal raja dipercayai seperti pohon yang rimbun, tempat rakyat tumpang berteduh. Anggapan rakyat terhadap raja yang sedang bekerja begitu tinggi. Sehingga Sejarah Melayu menegaskan “*rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon, jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya.*”

Sistem Kesultanan telah diakui sebagai satu institusi pemerintahan yang besar sumbangannya kepada perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggung jawab secara langsung menentukan hal sebuah kerajaan. Sepanjang sejarah kesultanan Islam telah terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara (Habiburrahman, 2016:95).

Dalam rangka memajukan perniagaan, Sultan mengangkat seorang Syahbandar di Kota Palembang. Syahbandar adalah seorang pemimpin dan mengatur kota (Bandar) Palembang. Dia bertugas memajukan pelayaran dan perdagangan. Syahbandar juga memungut bea masuk dan keluar pelabuhan. Di samping itu syahbandar juga bertanggung jawab menjaga keamanan pedagang asing. Syahbandar memiliki kekuasaan yang makin besar, ia juga mengatur saudagar asing yang ingin bertemu Sultan, agar konsultasi (hubungan) berjalan lancar.

Sultan juga mengangkat petugas khusus yang mengurus tanah milik Sultan. Petugas ini disebut Jenang. Jenang ini juga mengurus masalah Keraton, Masjid dan Makam Raja-raja. Hubungan dengan pedagang VOC (Kompeni) Belanda juga

diadakan oleh Sultan Palembang pertama yaitu Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin. Pada mulanya hubungan dengan pedagang VOC sama kedudukannya dengan pedagang lainnya. Pada tahun 1642 VOC mendirikan Loji (Kantor Dagang) di Palembang.

C. Sistem Perdagangan abad ke 19

Memasuki abad ke-19 di kepulauan Indonesia terjadi perubahan politik. Perusahaan Dagang Hindia Timur atau lebih dikenal dengan VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799, setelah izin nya dibatalkan pada tahun 1795. Berbagai sebab menjadi latar belakang keruntuhan itu. Setelah runtuhnya VOC, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaannya, terutama kepulauan Indonesia.

Kerajaan Belanda menempatkan Gubernur Jenderal di Batavia sebagai perpanjangan tangannya. Melalui Jenderal intensifikasi perdagangan dan mengeksploitasi digiatkan demi mengisi kas Kerajaan Belanda yang defisit, termasuk pengiriman ekspedisi militer dan sipil keluar pulau jawa. Pada abad 19, sejumlah pengusaha Belanda dan Eropa lainnya membuka perkebunan tembakau yang besar di daerah Sumatra Timur, tepatnya di Tanah Deli (Safwan, 2004: 32)

Pemerintahan Belanda dan Sultan Deli memiliki kepentingan tersendiri. Pemerintah Belanda berusaha menciptakan kawasan Sumatra Timur/Deli menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan untuk pasar perdagangan Eropa. Tujuan ini sesuai dengan politik terbuka (opendoor politik) yang dijalankan Pemerintah Belanda mulai 1870. Opendoor politik dijalankan dengan maksud mencari investor asing agar mau menanamkan modalnya dalam industri perkebunan Indonesia.

1. Komoditas Dagang

Hubungan dengan luar negeri sejak dahulu kala adalah semata-mata hubungan dagang, berdasarkan perjanjian dagang (kontrak dagang) dengan atau tidak dengan hak monopoli, seperti kontrak dagang dengan VOC sudah ada sejak pertengahan abad ke 17 sampai dengan awal abad ke 19. Perdagangan diadakan dengan Pulau Jawa, Bangka, Negeri Cina, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Lingga dan Negeri Siam, di samping itu dari pulau-pulau lainnya datang juga perahu-perahu membawa dan mengambil barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan itu adalah berupa macam-macam kain linen, kain cita Eropa, dari yang kasar sampai yang halus. Terdapat juga barang-barang dari Cina seperti sutera, benang emas, panci-panci besi, pecah belah, obat-obat, teh, manisan dan barang-barang lain (Safwan, 2004:33).

2. Alat Tukar/Mata Uang

Mata uang yang digunakan di Kesultanan Palembang dan satu-satunya uang yang diizinkan untuk diterima di kas kerajaan adalah dolar Spanyol. Namun, beredar pula sejenis koin berukuran kecil yang dikeluarkan oleh otoritas kerajaan yang dinamakan pittis. Koin di potong dari lempeng yang terbuat dari timah hitam dan timah putih seta memiliki lubang segi empat di tengah (seperti uang tunai cina) koin-koin ini dirangkai dalam paket-paket yang masing-masing berisi 500 keping dan 16 keping yang (menurut Batavia Transactions) setara dengan satu dolar. Dalam menimbang emas. Satu tail dianggap sebagai sepersepuluh bagian dari kati (sekitar satu sepertiga pound) atau setara dengan

berat dua seperempat dolar Spanyol (Marsden, 2013:432 dalam Ilham, 2015:27).

Di samping itu beredar pula uang ringgit Belanda yaitu Hollandsche Rijksdaalder nilainya sama dengan 2000 pittis atau 2 ½ gulden, Zueeuwsche Rijksdaalder nilainya sama dengan 2 gulden 60 sen, Spaansche Matten atau Pilaedollar yang bernilai 2 gulden 25 sen atau sampai 2 gulden 40 sen, ringgit Maria Theresia, dolar Amerika. Ruppe India pagoda Siam, uang perak Spanyol nilainya 2 gulden 20 sen sampai 2 golden setali. Spanyol atau Spaansce Matt bernilai 8 real (Wieringa, Supriyanto,2013:52 dalam Ilham,2015:28).

Barang-barang dagangan yang penting lainnya adalah minyak kelapa dan minyak kacang (dari Jawa dan Siam), gula jawa, bawang, asam, beras, gula pasir, tembaga, besi, baja, barang-barang ke lontong dan sebagainya dan juga beberapa barang dari Eropa. Pedagang kain linen terbesar adalah orang-orang Arab, ada yang mempunyai kapal dan perahu sendiri, namun kebanyakan mereka adalah mengurus barang dagangan orang lain dari luar Palembang.

Sesudah orang Arab menyusul orang Cina yang membeli barang-barang dari perahu. Orang Palembang membeli dari orang-orang Arab dan Cina dan membawanya ke pedalaman untuk dijual di sana. Orang-orang Palembang biasa membeli barang dengan kredit dan membayar dengan barang-barang pula (barter) (Safwan, 2004:32).

Hasil-hasil dari Kesultanan Palembang yang diekspor adalah: rotan ikat, damar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading dan pasir emas. Barang-barang itu dikumpulkan dari

hutan-hutan dan dari tepi-tepi sungai. Selain dari itu ada yang sengaja di tanam seperti lada, kopi, tebu, gambir, pinang, tembakau dan nila. Hasil-hasil lainnya adalah ikan kering dan ikan asin, barang pecah belah, tikar rotan dan jerami, karung-karung, barang-barang dari kuning, sutera dijalin dengan benang emas (songket) dan lain-lain dari benang kapas tenunan sendiri.

Daerah hukum Palembang terdiri dari residen Palembang dan di samping itu daerah-daerah Rejang Empat Petulai (Lebong) dan Belalai di sebelah Selatan Danau Ranau. Hukum Adat Sumatra Selatan menunjukkan di seluruh daerah begitu banyak sifat-sifat kekeluargaan, sehingga membentuk suatu lingkungan hukum tersendiri (Djavid, 35)

BAB III

PROFIL KESULTANAN PALEMBANG

SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

A. Sejarah Kesultanan Palembang

Kesultanan Palembang adalah kesultanan yang cukup penting dan sungai nya tercatat sebagai salah satu yang tersebar di pulau. Sungai ini hulu di distrik Musi tepat di belakangnya deretan bukit yang terlihat di Bengkulu. Oleh karena itu sungai ini memiliki nama Air Musi di bagian awal alirannya tetapi di wilayah yang lebih rendah diberi nama Tatong (Marsden, 2013: 428 dalam Ilham, 2015:22).

Dengan demikian batas-batas wilayah dari Kesultanan Palembang terdiri sebelah utara dengan Jambi, di sebelah barat dengan Bengkulu, di sebelah selatan dengan Lampung, dan di timur dengan Laut Cina Selatan. Dilihat dari luas wilayah tersebut dapat ditegaskan bahwa wilayah Kesultanan Palembang saat itu meliputi Provinsi Sumatra Selatan sebagai provinsi Bengkulu dan provinsi Bangka Belitung sekarang ini (Ilham, 2015:24).

Kerajaan (Kesultanan) Palembang terletak di tepi sungai Musi. Ibukota Kesultanan adalah Kota Palembang yang terletak di kaki bukit Siguntang. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu bagian Ilir dan bagian Ulu. Sungai Musi bermuara di Sungsang. Sungsang juga merupakan muara dari anak sungai Musi yang berjumlah 9 buah. Kesultanan Palembang sebelah utara berbatasan dengan Jambi. Sebelah barat dengan Bengkulu, sebelah selatan dengan Lampung dan sebelah Timur dengan Laut Jawa. Sepanjang pantai Timur daerah ini terdiri dari rawa dan hutan lebat. Bagian barat terdiri dari bukit barisan

yang membujur di Pulau Sumatra. Daerah kesultanan Palembang umumnya iklim tropis (panas) (Safwan, 2004:30).

Kesultanan mempunyai ibukota yaitu biasa disebut oleh masyarakatnya dan di kenal dengan nama Palembang yang terkenal dengan banyaknya sungai di sekeliling kota Palembang.

a). Sejarah Kota Palembang

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang di kenal sebagai prasasti kedudukan Bukit. Kota Palembang tercatat sebagai salah satu kota yang paling maju perkembangannya di Indonesia dalam satu decade terakhir, Palembang juga merupakan ibu kota dari provinsi Sumatra Selatan (Rahman, 2020:01)

Sumatra Selatan adalah tempat pertama sekaligus terakhir di Asia Tenggara yang ditemukan dunia perjalanan internasional. Sebagai semacam barikade yang dihadapkan pada titik-titik masuk maritim ke Asia bagian timur. Emas dari rangkaian pegunungan nya, lali kapur barus dari hutan-hutan nya, menarik para pedagang dari seluruh dunia menuju magnet *swarna dwipa* (Tanah Emas). Karena itu ada beberapa jejak peninggalan tertua dari pengaruh India, Persia, Arab dan Cina di Asia Tenggara dapat ditemukan di sumatra (Ilham, 2015:22).

Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682 pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan

saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air (data statistik 1990) .

Nama Palembang sendiri berasal dari bahasa daerah yang terdiri dari dua kata, yaitu *pa* dan *limbang*. *Pa* menunjukkan tempat dan *limbang* berarti melimbang atau mengayak untuk memisahkan sesuatu (memisahkan emas dari air dan tanah). Menurut cerita rakyat, salah satu sumber mata pencaharian penduduk Palembang pada saat itu adalah mendulang emas dari sungai Tatang (Rahman, 2020:03).

b). Letak Geografis

Ibu kota Kesultanan Palembang terletak di bagian timur pulau Sumatra 2,28 derajat Lintang Selatan dan 105 derajat Bujur Timur. Termometer fahrenheit di sana pada waktu pagi menunjukkan 80 derajat dan biasanya naik sampai 92 derajat pada tengah hari. Dalam bulan-bulan juni, juli, agustus dan September suhu tetap mempertahankan tinggi demikian juga dengan perubahan-perubahannya (Sevenhoven, 1971:11 dalam Ilsham, 2015:23).

Wilayah kesultanan Palembang pada awal abad ke 19 meliputi : Komering Ilir, Komering Ulu, Ogan Ilir, Musi Ilir, Musi Ulu, Banyuasin, Lematang Ilir, Lematang Ulu, Buai Bawan, Ranau, Buai Pemaca, Makakau, Bual Runjung, Kisam Saka I, Kisam Saka II, Semendo Ulu Luas, Semendo Darat, Enim, Mulak Ulu, Kikim Ulu, Mana, Pasumah Lebar, Pasumah Ulu Lintah, Pasumah Ulu Anyer Kroe, Ampat Lawing, Rejang Tengah Atau Musi, Musi Ulu, Musi Ilir, Rawas, Lebong, Dan Bangka Belitung. Dengan demikian batas-batas Kesultanan Palembang adalah sebelah timur dan timur laut dengan laut, di sebelah utara dan

barat laut dengan kesultanan Jambi, di sebelah barat dan selatan dengan wilayah keresidenan Bengkulu dan di sebelah tenggara dengan keresidenan Lampung (ANRI, Bundel Palembang No.62.2 dalam Farida, 2012:18)

c). Topografi

Ada karakter topografi yang agak berbeda antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Bagian wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar, dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi (+ 3,75 m di atas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun (dan akan dibangun) dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan (dan reklamasi). Di bagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m di atas permukaan laut dan ditemui adanya penggunaan-penggunaan mikro dan lembah-lembah yang "kontinyu" dan tidak terdapat topografi yang terjal (<https://alihamdan.id/sejarah-kota-palembang>).

Sampai jarak sekitar 5 Km ke arah utara Sungai Musi kondisi topografinya relatif menaik sampai punggung dan setelah itu semakin ke utara menurun kembali. Topografi Palembang memang kota yang dikelilingi air, bahkan terendam oleh air. Asal air disana baik dari rawa maupun dari sungai dan juga hujan, sehingga 52.54% tanah di Palembang tergenang oleh air.

Kerajaan (Kesultanan) Palembang terletak di tepi sungai Musi. Ibukota Kesultanan adalah Kota Palembang yang terletak di kaki bukit Siguntang. Sungai Musi membelah kota Palembang

menjadi dua bagian yaitu bagian Ilir dan bagian Ulu. Sungai Musi bermuara di Sungsang. Sungsang juga merupakan muara dari anak sungai Musi yang berjumlah 9 buah. Kesultanan Palembang sebelah utara berbatasan dengan Jambi. Sebelah barat dengan Bengkulu, sebelah selatan dengan Lampung dan sebelah Timur dengan Laut Jawa. Sepanjang pantai Timur daerah ini terdiri dari rawa dan hutan lebat. Bagian barat terdiri dari bukit barisan yang membujur di Pulau Sumatra. Daerah kesultanan Palembang umumnya iklim tropis (panas) (Safwan, 2004:30).

d). Ekologis

Seperti halnya wilayah Indonesia pada umumnya, iklim di kota Palembang termasuk iklim tropis dengan temperature berkisar 20-30 berajat Celsius. Dampak pemanasan global beberapa kurun waktu terakhir menyebabkan perubahan iklim yang dapat dilihat dari curah hujan dan hari hujan yang berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir selama 2015, rata-rata curah hujan perbulan sebesar 128 mm dan rata-rata hujan perbulan adalah 10 hari setiap bulannya.

B. Sosial Kemasyarakatan Kesultanan

Penduduk kesultanan Palembang secara umum adalah orang Melayu bercampur dengan orang-orang Jawa. Di daerah uluan mereka selalu menghubungkan asal usul mereka dengan Majapahit/Jawa. Di sekitar pusat pemerintah Palembang banyak penduduk yang berasal dari keturunan Jawa (pada abad ke 16 Palembang berhasil dikuasai oleh Mataram). Mereka bercampur dengan orang Melayu dari Malaka dan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya, termasuk dengan orang-orang Melayu dari pantai timur Sumatra. Orang Timur Asing

yang tinggal di sekitar ibu kota terdiri dari orang Cina, Arab dan orang asing lain nya.

Di daerah pedalaman terdapat suku terasing yaitu *kubu* dan *gugu*. Sebagian besar penduduk yang berada di daerah *ulu*an umumnya hidup berkelompok di tepi-tepi sungai sehingga pola permukaan penduduk di wilayah itu tidak sama. Sementara itu, di daerah *iliran* yaitu wilayah Timur yang terdiri dari daratan rendah dan pantai (rawa-rawa dan paya-paya sehingga tidak cocok untuk pertanian) Penduduknya sangat jarang. Mereka menghuni wilayah yang sangat luas, hampir separuh luas keseluruhan wilayah kesultanan Palembang pada awal abad ke 19 (Farida, 2012:20).

Palembang merupakan daerah yang cukup subur. Tanaman untuk ekspor juga dihasilkan daerah kesultanan Palembang. Tanaman itu adalah : lada, kopi, cengkih, dan tumbuhan. Di daerah pedalaman juga dihasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Di daerah pedalaman bertani disebut dengan ladang. Sistem ladang dinamai “Ume”. Sebagian besar daerah pedalaman hidup bertani. Penduduk kota Palembang hidup dari pelayaran dan perdagangan.

Penduduk kesultanan Palembang terdiri dari dua golongan yaitu golongan bangsawan (*priyayi*) dan rakyat biasa. Golongan bangsawan terdiri dari : Pangeran, Raden dan Mas Agus. Golongan rakyat terdiri dari orang Mijidan orang Senan. Di samping itu terdapat golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab dan India. Status Bangsawan tidak hanya berdasarkan kelahiran atau keturunan. Mereka yang berjasa kepada Sultan Muhammad Badaruddin II juga diberi gelar Bangsawan. Bangsawan yang diangkat ini juga diberi hadiah daerah kekuasaan tertentu. Mereka mengusahakan hasil bumi atau kebun yang sebagian diserahkan kepada Sultan (Safwan, 2004:31)

Orang Arab, India dan Cina umumnya tinggal di kota Palembang. Mereka hidup dari berdagang. Tempat tinggal mereka tidak jauh dari pasar. Orang-orang ini membentuk perkampungan tersendiri di dalam kota Palembang. Sultan Muhammad Badaruddin II memperoleh sumber keuangan dari golongan pedagang dan Sultan juga menerima setoran pajak dari pelabuhan. Rakyat biasa umumnya terdiri dari orang Senandan orang Mijiyang bertempat tinggal di kota Palembang hidup sebagai buruh dan ada juga yang bertani. Mereka dikenakan pajak, tetapi harus mengabdikan kepada Sultan Muhammad Badaruddin II.

Struktur masyarakat Palembang yang multikultur menjadikan masyarakat terstratifikasi ke dalam beberapa lapisan social stratifikasi social masyarakat yang dapat dilihat dalam berbagai determinan baik determinan ekonomi, social, pendidikan dan budaya tidak membuat masyarakat sungkan untuk berkunjung ke makam keramat. Beragam lapisan masyarakat yang hadir ternyata memiliki karakter pola kepercayaan yang berbeda dalam menginterpretasikan ritual ziarah. Lapisan social atau stratifikasi di dalam masyarakat terbentuk karena adanya sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat. Hal ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan materil saja tetapi juga dapat berupa immaterial, seperti kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan yang terhormat (Qibtiyah, 2014:53).

1) Status Sosial Masyarakat

Penduduk Palembang dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan priyayi dan golongan rakyat. Priyayi berarti keturunan raja-raja atau kaum ningrat. Kedudukan ini dapat diperoleh karena kelahiran atau perkenaan dari raja. Priyayi-priyayi dibagi lagi menjadi tiga golongan yaitu pangeran, Raden dan Mas Agus. *Pangeran* berarti yang memerintah. Gelar ini

harus selalu diberikan oleh raja dan tidak seorang pun mendapatkan nya yang tidak mempunyai jabatan.

Tetapi kemudian gelar ini diberikan kehendaknya dan di daerah pedalaman gelar pangeran ini tidak begitu dihargai. Anak laki-laki raja sendiri dan anak laki-laki dari para pangeran yang biasanya memakai gelar ini, tetapi gelar ini tidak dapat diwariskan dan raja dapat tidak memberikan gelar pangeran dan raja dapat memberikan gelar pangeran kepada siapa yang ia ingin berikan (Sevenhoven, 1971:25-26 dalam Ilham, 2015:25).

Kelompok sosial yang kedua juga terbagi ke dalam tiga lapisan. Pertama adalah *kiai agus* atau *Ki agus* yaitu anak mantri atau anak lelaki seorang raden dari perkawinannya dengan perempuan dari golongan kebanyakan. Kedua adalah *Kiai Mas* atau *kemas* adalah anak lelaki seorang lelaki golongan kebanyakan dari perkawinannya dengan seorang perempuan bergelar Mas Ayu. Dari lapisan kedua sosial ini dapat dipanggil oleh sultan untuk memberikan bantuan pribadi namun mereka tidak dibebankan dengan tugas-tugas yang berat yang dianggap rendah (Sturler, 1855:11 dalam Ilham, 2015:25).

Di antara orang Mijidan orang Senanini ada yang menjadi prajurit Kesultanan. Mereka juga bertugas membuat benteng pertahanan. Selain itu mereka melayani keperluan Sultan seperti memperbaiki rumah dan perahu Kerajaan. Orang Mijidan orang Senan merupakan prajurit yang tangguh dalam peperangan. Perkembangan agama Islam di Kesultanan Palembang mengalami kemajuan pesat. Dalam pemerintahan Sultan Abdurahman atau Sunan Cindeh Balang (1659-1706) agama Islam ditetapkan sebagai agama resmi Kerajaan (Farida, 2009:12)

Kehidupan sosial Kesultanan yang terstratifikasi, tampaknya berbanding balik dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, tidak ditemukan adanya terstratifikasi sosial. Islam sendiri tidak memandang kedudukan seseorang dari fisik, jabatan atau status sosial, maupun harta melainkan dari pandangan ketakwaan seseorang (Raviko, 2013:58).

Situasi yang bertolak belakang ini dapat dilihat dari kehidupan keagamaan di Palembang yang memperlihatkan kemajuan kualitatif para Sultan yang merupakan seseorang yang taat agama, mereka sering menjadi imam di masjid, ulama-ulama sendiri mendapat kehidupan tersendiri dalam kehidupan Sultan. Para Sultan sangat dekat dengan para ulama untuk mendiskusikan sosial keagamaan (Wolders, 1976:132).

Terdapat pelanggaran ajaran agama yang prinsip para Sultan bersikap tegas. Pada tahun 1819 Sultan pernah menuntut membunuh dan di raja merajam wanita-wanita jalang yang terang-terangan mengadakan hubungan dengan serdadu Belanda (Sovenhoven, 1971:42 dalam Raviko, 2013:59).

Terlepas dari perbedaan tersebut, dalam kehidupan Kesultanan Palembang dikenal sebagai pekerja-pekerja tangan yang sangat teliti. Dalam hal pekerjaan tembaga dan besi mereka sangat baik. Mereka mengecor meriam-meriam dari tembaga, senapan, keris, dan pedang di buat dengan sangat baik. Mereka juga ahli di dalam bidang emas dan perak, terutama dalam pembuatan pahatan timbul. Wanita-wanita juga memiliki keahlian sutra-sutra terbaik dan kain-kain yang berseling benang emas dibuat di sini dan dikirim di mana-mana. Mereka pandai

sulam, melukis, berbagai bentuk dan bunga-bunga di atas kain sutra dan katun (Aly, 1986:158 dalam Raviko, 2013:62).

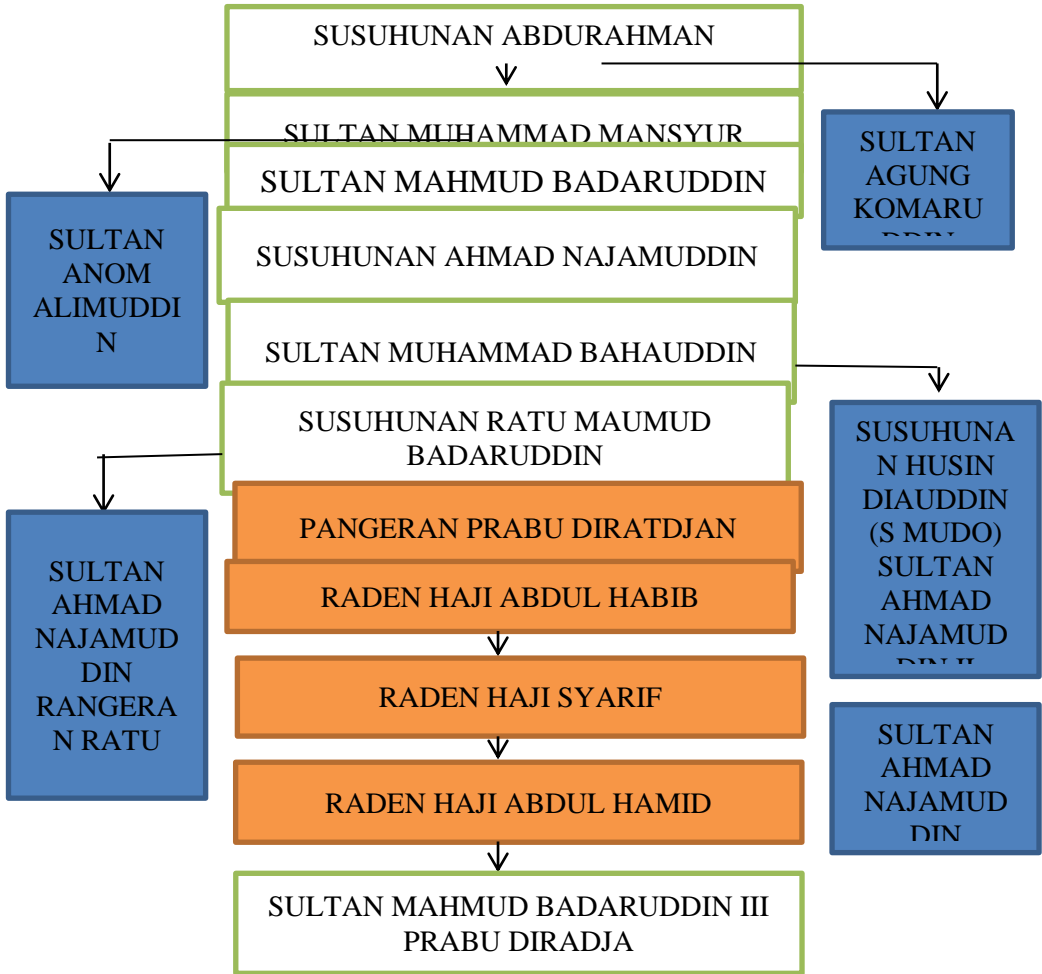
Dalam hal ini Sultan menteri, dan kelompok priyayi lainnya merupakan kelompok elit yang dapat memerintah dan memiliki peran penting dalam mengatur stabilitas ekonomi politik dan menjaga keamanan warga di wilayah kekuasaan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Elit yang berkuasa adalah elit yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan control (pengawasan) polititik. Para elit menjadi komunikator utama untuk mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi sekaligus mengatur lalu lintas transformasi peran-peran komunikasi yang mengalir secara vertical dan horizontal. Elit berkuasa (elit pemerintah) ini selalu menjalin komunikasi dengan elit masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukannya. Dalam hal menjalin komunikasi elit penguasa Kesultanan Palembang menjalin komunikasi dengan elit masyarakat sebagai upaya mendapat legitimasi dan memperkuat kedudukan dilakukan dengan cara kompromi (Raviko, 2013:07).

2) Silsilah Kekerabatan Kesultanan Palembang

Tulisan tangan Arab yang dibuat oleh seorang priyayi di Palembang dapat dibaca sebagai berikut : Telah diriwayatkan bahwa telah berpindah beberapa anak raja-raja dari tanah Jawa ke negeri Palembang di karena kan Sultan Pajang menyerang Demak, yang bermula menjadi raja di Palembang ialah Kiai Geding. Kiai Geding Suro wafat kemudian digantikan oleh Kiai Geding Suro Mudo anak Kiai Geding Ilir dan ketika itu, anak-anak raja yang berpindah dari tanah Jawa ke negeri Palembang yaitu 24 orang. Beberapa orang keturunan Pangeran Trenggono

yang hijrah ke Palembang di bawah pimpinan Kiai Geding Suro Tuo yang menetap di perkampungan Kuto Gawang di daerah di sekitar kampung Palembang Lamo (Akib, 1969:11).

Bagan Kekerabatan Kesultanan



Bagan : 1 Silsilah Keluarga Kesultanan Palembang

Sumber : Kanzunqalam.com diakses pada 21 juni 2021

Bagan di atas merupakan silsilah Sultan-Sultan Palembang pada setiap periodenya. Adapun, nama-nama Sultan pada setiap periodenya yaitu :

- 1) Susuhunan Abdurrahman khalifatul Mukmin Syaidul Imam (- 1069-1118 H / 3 Maret 1666-1707 – M).
- 2) Sultan Agung Komaruddin Sri terunp menjabat sementara 1126-1136 H/ 1714-1724 M.
- 3) Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago 1118-1126 H/ 1706-1714 M
- 4) Sultan Anom Alimuddin tidak memerintah 1126-1714 M
- 5) Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB I) 1136-1171 H/ 1724-1776 M
- 6) Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo 1171-1190 H/ 1758-1776 M.
- 7) Sultan Muhammad Bahauddin 1190-1218 H/ 1776-1803 M.
- 8) Susuhunan Husin Dauddin (S Mudo) Sultan Ahmad Nahamuddin II Diangkat Ing Geris Dan Belanda.
- 9) Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom Diangkat 1821 Oleh Belanda.
- 10) Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin Raden Hasan Pangeran Ratu (Sunan Tuo SMB II) -1218-4 Syawal 1236/1803-1821 (Dasingkat keternate).
- 11) Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (1819) tidak memerintah karena ikut SMB II diasingkan belanda ke ternate tanggal 04 syawal 1236 dan wafat di ternate (Maluku Utara).
- 12) Rangeran Prabu Diratdjan Haji Abdullah.
- 13) Raden Haji Abdul Habib Prabu Diratdjah II.
- 14) Raden Haji Sjarif Prabu Diratdjah III.
- 15) Raden Haji Sjarif Prabu Diratdjan III.
- 16) Raden Haji Abdul Hamid Prabu Diratdjan IV.

- 17) Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja Raden Muhammad Sjafei Parabu Diradja diku kuhkun pada tanggal 03 maret 2003 M di Palembang Darussalam.

Sebagaimana diketahui, Pangeran Trenggono adalah putra Raden Fatah, bin Prabu Kertabumi Brawijaya V dari Majapahit dengan istrinya seorang putri dari Cina, lahir dan dibesarkan di Palembang di istana saudaranya lain ibu yaitu Ario Dillah. Sejak awal dari pemerintahan Kiai Geding Sedo Ing Lautan hingga pada masa Pangeran Sedo Ing Rejek, Palembang belum berstatus Kesultanan, tetapi masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram dan baru pada masa Pangeran Ario Kesumo, Palembang memutuskan hubungan dengan Kerajaan Mataram dan Pangeran Ario Kesumo yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Ario Kesumo adalah Sultan Palembang Pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam memerintah dari tahun 1659-1706 (Yusuf, 2006:2 dalam Ilham, 2015:28).

Setelah Pangeran Ario Kesumo mendirikan Kesultanan Palembang bebas dari penguasaan Mataram, beliau menjadi Sultan yang pertama. Pada tahun 1703 beliau dinobatkan seorang putranya anak dari Ratu Agung sebagai Raja Palembang Darussalam yang kedua dengan gelar Sultan Muhammad Mansur (1706-1714). Kemudian Sultan Muhammad Mansur digantikan oleh adiknya bernama Raden Uju yang kemudian dinobatkan menjadi Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714- 1724).

Kemudian beliau digantikan oleh keponakannya Pangeran Ratu Jayo Wikramo dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah dari tahun 1724-1758. Pangeran Adi kesumo merupakan putra kedua dari Sultan Mahmud Badaruddin I yang dinobatkan sebagai

Sultan Palembang Darussalam kelima dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin I yang memerintah dari tahun 1758- 1776 (Akib, 1969:04).

Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin I digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Sultan Mahmud Badaruddin dinobatkan sebagai Sultan Palembang Darussalam yang keenam memerintah dari tahun 1776-1803. Sultan Mahmud Baharuddin digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang Darussalam yang ketujuh dan memerintah dari tahun 1803-1821 (Safwan, 2004:24-26).

Sejak awal masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II telah bercita-cita akan masa depan negerinya yang lepas dari cengkeraman pemerintah Belanda. Oleh karena itu sultan mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial Belanda. Keberanian Sultan Mahmud Badaruddin II untuk tidak mengakui kekuasaan Belanda dan Inggris serta melakukan pengusir orang-orang Belanda dari Palembang dengan melakukan penyerbuan ke Loji Sungai Aur. Peristiwa penyerbuan loji ini dikenal dengan nama peristiwa Loji Sungai Aur (Ilham, 2015:43-44).

D. Perekonomian Kesultanan Palembang

Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin, Sultan di hadapkan dengan masalah bajak laut yang pada saat itu mengganggu hubungan dengan Belanda dan pedagang-pedagang yang datang ke Palembang. Pada tahun 1792 perampokan Lanun menyerang Sungai Liat. Setelah tidak berhasil menyerang Sungai Liat, para perampok menyingkirkan Sungai Kapu. Bajak Laut secara bar tahap berhasil menguasai dan menduduki Koba, Kuru, dan Pangkal. Kemudian menyerang

pemukiman pedalaman di Paku, Pangkal Pinang dan Jerah (Ilham,2019:40).

Untuk memperkuat posisi Tobali dari serangan bajak laut, maka Sultan mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Raden Keling, Raden Ahmad, Raden Badan, Raden Ali, Raden Sakbah. Selain itu sultan membangun benteng pertahanan di sekitar Muara Sungai Bangka kota dan menjadikan Bangka kota menjadi pusat armada Laut.

Hal ini untuk menghalau gangguan bajak laut Bugis dan menghadapi Kerajaan Melayu Jambi (Darmasyah 2004:46) sehingga perairan yang ramai dengan lalu lintas kapal dagang keluar masuk pelabuhan Palembang menjadi aman. Dalam menghadapi ancaman dan gangguan bajak laut di perairan Bangka Belitung, Sultan Muhammad Badarudin dapat mengatasi gangguan tersebut.

Sultan Mahmud Badaruddin mengelola tambang timah di pulau Bangka lebih serius lagi. Pasir timah pertama kali di oleh di Distrik Menerawang, pasir timah tersebut diketahui saat pembakaran ladang. Orang Melayu yang tinggal di dan tersebar di Bangka diperintah oleh Wan akub untuk belajar cara memperoleh Timah melalui penggalian dengan peralatan berbentuk sekop untuk menggali lapisan timah yang agak dalam (Suryadin, 2004:5).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin, Bangka termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang. Sultan menaruh perhatian ekstra terhadap Bangka karena hasil timahnya merupakan komoditas yang cukup menguntungkan Palembang. Usaha Sultan Mahmud Bahauddin dalam memanfaatkan potensi tambang timah Bangka mendapat tantangan dari beberapa pihak, termasuk kaum lanun (perompak), kerajaan tetangga seperti Lingga, bahkan kongsi

dagang Eropa seperti East India Company (EIC) milik Inggris dan Vereenigde Oost Compagnie (VOC) milik Belanda yang rakus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

EKONOMI POLITIK KESULTANAN

A. Peran Sultan dalam Perekonomian Palembang

Peranan Kesultanan Palembang memegang kendali perdagangan, tidak berlebihan bila Kesultanan Palembang digambarkan sebagai pengusaha jaringan lalu-lintas kapal-kapal “antar Asia” Kesultanan Palembang adalah penghubung antar pusat-pusat perniagaan trans-Asia yang berkembang pada masa itu (Zed, 2003:33). sebagai penguasa perdagangan dan pelayaran Kesultanan Palembang tidak bergantung pada kapal-kapal dan para pedagang asing yang datang ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah itu, melainkan juga secara aktif terlibat dalam pengiriman kapal-kapal dagang ke negara-negara lain dan negara bawahannya (Muljana, 1981:81 dalam Nawiyanto dan Endrayadi, 2016:18).

Pada Masa pemerintahan Sultan Najamudin II, ia tidak memungut *tibang-tukong* sesuai ketentuan yang ada. Setiap marga ditetapkan untuk menyetorkan beberapa komoditas yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam *tibang* dan *tukong* seperti beras, lada, kopi gambir, lilin, dan rotan dan kerbau jumlahnya dinaikkan 50-100 real. Hal ini dilakukan dua sampai empat kali setahun (sebelumnya hanya satu kali setahun atau maksimal dua tahun setahun) secara rutin sehingga rakyat kehilangan sumber kehidupan sepanjang tahun.

Sebagai pemegang monopoli perdagangan rakyat, Sultan menjalankan sistem perdagangan yang dikenal dengan istilah *tibang* (*tiban*) dan *tukong* (*tukon*). *tibang* sendiri adalah pertukaran wajib barang-barang produk dari pedalaman dengan barang-barang impor.

Sedangkan *tukong* adalah penukaran barang dari uang barang-barang yang digunakan untuk barang-barang *tibang* adalah baju Jawa, kain Bengala putih, kapak/parang besi. Barang-barang ini biasanya nilainya dikalikan dengan seratus atau bahkan di selewenkan mencapai dua ratus. Dalam hal ini sangat mempengaruhi perekonomian pada saat itu.

Dengan berpengaruhnya suatu perjalanan pada roda perekonomian adapun aktor-aktor yang terlibat pada abad ke 18 seperti Sultan Mahmud Badarudin sebagai sultan yang memimpin pada saat itu serta Gubernur Jenderal Johannes Siberg sebagai wakil dari pihak Kolonial Belanda yang sangat berperan penting dalam menjalankan roda perekonomian pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II periode kekuasaan 1804-1812.

Peran Sultan Mahmud Badaruddin II juga memiliki sebuah peran yang sangat mempengaruhi roda perekonomian pada saat itu yaitu memiliki peran sebagai produsen atau pun juga yang memegang kekuasaan pada saat itu. Semua yang berhubungan dengan produk-produk yang di keluarkan dari Kesultanan Palembang harus mempunyai persetujuan dari Sultan Mahmud Badaruddin.

Di Kesultanan Palembang mata pencaharian masyarakatnya adalah menangkap ikan, bertani, bertani, mengumpulkan hutan dan hasil tambang. Sistem pertanian pada masa Kesultanan masih sangat sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagian hasil pertaniannya dijual. Komoditas sebagian hasil pertanian adalah lada sedangkan hasil alam adalah timah.

Pasar membutuhkan komoditas pasar lada dan timah dalam jumlah besar untuk dijual dan komoditas tersebut lebih berperan dalam sektor pengangkutan dan perdagangan Sultan Palembang. Pada abad ke-18 daerah Kesultanan Palembang berkembang menjadi daerah

penghasil lada dan timah. Keduanya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keadaan ini menjadikan Kesultanan Palembang salah satu Kesultanan yang terkenal.

Dari banyaknya produk komersial yang di hasilkan oleh Kesultanan Palembang, maka wajarlah kalau Kesultanan ini tidak pernah ditinggalkan oleh bangsa Eropa (Belanda Inggris).

Kerajaan Jambi adalah salah satu contoh daerah yang ditinggalkan oleh inggris tahun 1679. Bahkan para pedagang Maritim Nusantara dari Jawa, Makasar, dan Eropa lainnya tidak lagi berlabuh lagi di pelabuhan Jambi pada awal abad ke XIX (Locher dan Scholter , 2008).

Menurut ulasan diatas kerajaan Jambi merupakan daerah yang di tinggal oleh pihak inggris dalam sistem kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Kontrak-kontrak yang dibuat oleh Belanda sejak abad XVII dan Inggris menunjukkan keberadaan Palembang sangat penting bagi kaum kolonial.

Produk yang dihasilkan adalah bunga emas, campuran lainnya adalah dua bagian tambang dan tembaga dengan bagian yang sama-sama maka akan dihasilkan perhiasan yang sangat berkualitas. Belum lagi tembaga itu sudah diolah dengan teknik perekat dan diperoleh banyak produk yang sangat baik.

Hal ini sudah barang tentu tidak lepas dari lokasi *geo-politik* Kesultanan Palembang yang sangat strategis. Kekuasaan yang begitu dominan atas bidang pelayaran dan perdagangan di selat Malaka membuat Kesultanan Palembang mempunyai pemasukan yang besar. Pemasukan tidak hanya dikenakan dari cukai yang dikenakan dengan kapal-kapal yang melintas tetapi juga dari perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan tergantung musim membuat kapal yang

singgah dalam beberapa waktu sambil menunggu angin yang baik. Selama masa menunggu, para pedagang melakukan bongkar muat barang perdagangan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016:20).

Di pulau Sumatra lada banyak dihasilkan oleh Pidi, Pasai, Indra giri, Kampar, Pariaman, Indra pura, Silebar, Jambi, Palembang dan Lampung (Leur, 1967:25-26). Abad XVII lada merupakan satu-satunya produk paling cocok untuk Eropa, harga lada pada 1662 mencapai empat real per pikul. tingginya harga lada dan wajibnya menjual kepada VOC (*Vereenigde Oost Indesche Compagnie*) sesuai dengan kontrak yang telah disetujui oleh pihak Kesultanan Palembang, menyebabkan para Raja-raja mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah *uluan* (terbesar di daerah Rawas) Bangka dan Belitung. Akibatnya Kesultanan Palembang merupakan salah satu penghasil lada terpenting di Nusantara (Farida, 2009:3).

Produk-produk dagang yang di jual oleh pihak Kesultanan Palembang kepada pedagang asing maupun lokal untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mendapatkan potongan harga seperti Sultan dengan Pemerintah Belanda dengan harga yang di patok murah.

Pada Sri Sultan Mahmud Badaruddin tidak usah kasih apa-apa barang yang keluar dari itu tempat separuh kopi dan pada surat lain apa-apa kepada Gubernur dia boleh jual pada orang yang mana dia punya suka yang di mana da boleh dapat untung (Ilham,2015:162).

Berdasarkan ulasan diatas Belanda telah mengetahui bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II memang di ikat dengan perjanjian yang memang Banyak memberikan kerugian bagi pihak Kesultanan. Belanda juga memberikan izin untuk menjual produk-produk dengan para pedagang dari luar, akan tetapi Belanda sudah di prediksi dan

menganalisis bahwa pihak Kesultanan tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual produk-produk yang nilainya tidak terlalu mahal dan laku di pasaran Eropa. Justru produk yang di jual seperti sahang hanya dapat di jual dengan sedikit karena di akibatkan monopoli Belanda dalam perniagaan lada dan timah.

Pada akhir abad ke 18 di Eropa terjadilah perubahan besar di bidang politik, hal itu juga berpengaruh di bidang politik perdagangan. Dengan adanya pergolakan politik dan peperangan di Eropa membangkitkan perubahan politik pada Belanda.

B. Kondisi Politik Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin

Politik yang dijalankan oleh Kesultanan selama berdiri lebih kurang 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan sebuah organisasi pemerintah yang cukup stabil, dimana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan perdagangan yang cukup memadai terpelihara dengan baik. Sistem pemerintah yang dibangun merupakan sistem pemerintah kesultanan. Bentuk pemerintahan yang diterapkan pada Kesultanan Palembang merupakan bentuk monarki atau sistem kerajaan. Dimana penguasa atau raja diganti berdasarkan garis keturunan atau keluarga dari pihak kesultanan.

Bentuk pemerintahan pada Kesultanan Palembang berlandaskan pada fondasi agama islam sehingga aturan yang di terapkan berdasarkan al-quran dan hadist. Bahkan John L. Esposito (1990:41) dalam bukunya islam dan politik menyatakan bahwa faktor signifikasi dan elemen terpenting dalam politik islam adalah teks yang telah terkodifikasikan dalam syariat. Syariat juga menjadi pembela dari doktrin dan aksi politik islam dan non-muslim pada akhirnya syariat ini menjadi pembentuk

identitas kemusliman seseorang dan menjadi dasar bagi pendirian suatu Negara (Raviko, 2013:56).

Kesultanan Palembang yang berbentuk monarki merupakan golongan bangsawan, golongan bangsawan memegang penuh kekuasaan berdasarkan “wahyu tuhan” sebagai dasar legalitas. Para bangsawan yang mempunyai kesempatan menjadi pembantu raja. Dasar keserian dan kepercayaan ini di imbangi pula dengan orang-orang yang paling dekat (keluarga) dengan raja (Hanafiah, 1995:172).

Dapat diketahui bagaimana sebelumnya disekitar abad 13-14 pada lapisan teratas adalah raja, diikuti oleh pegawai Negara dan pujangga. Kemudian baru pada zaman kemunduran Majapahit, bupati-bupati khususnya di sepanjang pantai jawa makin lama makin peran penting bersaing dengan kekuasaan keratin. Akhirnya dengan makin berpengaruh VOC di Nusantara maka rantai lapisan semakin bertambah, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin makin jauh hal ini tampak dalam antara kawula dan gusti (Susanto, 1979:101).

Sebagaimana yang di ketahui pada abad ke 13-14 pengusaha tertinggi adalah raja, dan ikatan antara atasan dengan priyayi memiliki hubungan yang sangat baik seperti halnya ikatan yang didasarkan atas model hubungan kekeluargaan. Sekalipun demikian mereka tetap memiliki batasan antara atasan dengan bawahan ditandai dengan tegas sekali oleh tata cara kepengangkatan dan bentuk-bentuk penghormatan yang tidak dapat di hindari oleh siapapun.

Terlepas dari itu sistem pemerintah Kesultanan Palembang diatur rapi, begitu juga pada aparatur keamanan. Diadakan peraturan-peraturan bagi para pedagang dan penduduk datang juga di berlakukan hukum-hukum adat, yang bersumber pada kitab undang-undang,

kemudian ditambah lagi undang-undang wilayah. Dengan diaturnya sistem pemerintah pada Kesultanan Palembang maka terjadilah keterlibatan masyarakat, sehingga terciptalah keamanan dan ketentaraman serta berkembang berbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan, kesenian dan kesastraan.

Pretasi yang di peroleh dalam sistem politik Kesultanan Palembang yang paling menentukan perkembangan Kesultanan terjadi pada masa Sultan Susuhunan dengan kebijakannya untuk melepaskan diri dari ikatan protektorat kesultanan Mataram tahun 1675 tanpa menimbulkan perang penindasan (Amin, 1986:101). Prestasi politik lainnya adalah ketika pergantian kekuasaan dari Sultan Ratu Ahmad Najamudin I ke Sultan Mahmud Bahaudin hingga Sultan Mahmud Badaruddin II, di dalam lingkungan keraton relatif tidak terjadi gejolak politik. Hukum di dalam pemerinthan bener-bener di berlakukan dengan baik dan tegas. Peristiwa sejarah ini kemudian membatah konsep pergantian yang di kembangkan oleh pareto yang mengemukakan bahwa pergantian elit sering menimbulkan perebutan kekuasaan dilakukan oleh kelom-kelompok elit yang memerintah itu sendiri (Varma, 1987:203-205 dalam Raviko, 2014:55).

Dalam hubungan yang terjalin antara Kesultanan Palembang dengan belanda dapat diperkirakan telah berlangsung sejak lama (1616 M). Pada akhir abad ke 18 di Eropa terjadilah perubahan besar pada bidang politik, hal itu juga berpengaruh di bidang politik perdagangan. Pergolakan politik membangkitkan perubahan politik di Belanda. Perubahan tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga para pedagang dari Belanda yang bergabung dalam VOC memperoleh hak monopoli dagang dengan jalan membuat suatu

perjanjian dengan penguasa di daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah.

Maka dari itu para penguasa bersekutu dengan pedagang dari Belanda dan Inggris itu bukan hanya saja mendapatkan modal tetapi juga mendapatkan kapal-kapal perang beserta pasukan dan persenjataan untuk melindungi milik mereka dimana saja.

Kondisi politik pada Kesultanan Palembang mendapatkan tantangan dalam menghadapi kolonial belanda dan inggris. Dengan kelebihan teknologi yang di miliki belanda dan inggris serta kelecikan yang mereka gunakan dapat merugikan Kesultanan Palembang. Politik Belanda menggunakan taktik yang tidak ketara yaitu dengan cara menjalin persahabatan dengan pihak Kesultanan Palembang untuk mendapatkan izin dagang. Kemudian mengusahakan jalan untuk menekan harga jual beli demi mendapatkan keuntungan yang sangat banyak demikian meningkatkan monopoli dan mulai mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan agar dapat di kuasai. Dengan taktik muslihat inilah pada akhirnya menjadi factor konflik bagi Kesultanan Palembang baik secara internal dan eksternal.

C. Ekonomi Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin

Kesultanan Palembang berdiri pada pertengahan abad XVII, tepatnya di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Rahmat Khalifatul Mukminin Syaidul Imam (1659-1702). Sebelumnya berbentuk Kerajaan Mataram. Perubahan bentuk pemerintahan ini, menandai pula lepas nya Palembang dari Mataram. Sebagai kerajaan yang berdaulat penuh, maka kesultanan Palembang makin berkembang perekonomiannya. Dengan posisi yang sangat strategis, di topang dengan pemerintahan yang stabil, Palembang juga banyak menghasilkan komoditas yang sangat

dibutuhkan baik oleh pasar domestik maupun internasional (Farida, 2009:12).

Kondisi yang terjadi pada Kesultanan Palembang menjadi dilema sebab di satu sisi ini menguntungkan, namun di sisi lain justru menjadi bumerang yang menempatkan Palembang menjadi diincar bangsa-bangsa imperialis dunia dan khususnya Belanda dan Inggris. Penetapan kurun waktu yang panjang, di maksudkan untuk melihat secara global perekonomian Palembang yang menjadi fenomena menarik bagi bangsa-bangsa kolonial dunia, sehingga muncul istilah “mahal lada” dan “emas hitam” untuk mewakili komoditas terpenting dunia yang di hasilkan oleh kesultanan Palembang.

a. Pengelola Pertambangan Timah

Sultan Mahmud Badaruddin II lalu mencari bantuan dengan meminta kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg agar membantu Kesultanan Palembang dalam menghadapi perampok laut dari Lingga yang di komandan oleh Panglima Ramin, Hanun, dan Aru Manpu yang merupakan anak-anak dari Raja Bugis yang berusaha untuk mengambil Alih dan merampas timah yang telah ditambang oleh pihak Kesultanan.

Dalam surat yang dikirim oleh Sultan Mahmud Badaruddin kepada Gubernur Jenderal Johanes Siberg, kedua belah pihak telah memiliki kepentingan masing-masing demi mempertahankan kedudukan dan upaya saling melindungi berbagai kepentingan kesultanan dan pemerintahan kolonial (Ilham,2019:148).

Gubernur Jenderal dan para anggota Dewan Hindia, bahwa pada saat ini para kawula di Bangka mengalami banyak

kesulitan dan kesedihan, oleh karena perampok laut dari Lingga, Panglima Ranim dengan Hanun dan Aru mampu, yaitu putra dari Raja Bugis, telah menyerang Tanah Bangka, dan kemudian menyerang dan menghancurkan tempat-tempat di mana terjadi penambangan Timah: banyak kawula di Bangka telah tewas dan cidera, dan semua timah yang ditemukan di sana, telah dirampas dan di bawa pergi oleh perampok. Paduka Sri Sultan Ratu segera memerintah kepada para kepala dan para menteri bersama-sama dengan semua kawula untuk menggalang seluruh kekuatan dan mengusir para perampok yang terus menerus menyerang Negeri Palembang: namun mereka belum berhasil mengusirnya. Karena sampai sekarang mereka sedang berperang dengan para perampok tersebut: akibat oleh serangan para perampok ini banyak awak dari kedua belah pihak yang tewas dan cidera, dan hal yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Paduka Sri Ratu adalah sehubungan dengan kapal-kapal Siramin, bahwa kapal-kapal tersebut berbondong-bondong berlayar pulang pergi ke Lingga, untuk membawa segala sesuatu yang mereka perlukan, dan demikian keadaan sekarang yang sudah diketahui oleh Residen Palm (Market Diplomasi).

Berdasarkan ulasan inilah yang diketahui oleh Residen Palm telah mengacaukan hubungan ekonomi antara Kesultanan Palembang dan pemerintahan kolonial, di sisi lain Kesultanan Palembang juga mendapatkan kerugian dari pertambangan timah yang dirampas oleh perampok serta pemerintahan Kolonial telah kehilangan hak monopoli timah di Kesultanan Palembang.

Gerombolan perampok yang telah beroperasi di pantai malaya dan perairan Riau mengadakan perampokan di sekitar Selat Malaka dan pantai timur Sumatra. Umumnya mereka berasal dari pangkalan Lanun di Kalimantan Utara yang berpusat di Teluk Marudu dan daerah Tempasuk.

Dengan adanya kejadian ini perampokan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Lanun yang terjadi di perairan Riau pada abad ke-18 adalah sebagai akibat tindakan Belanda di sini untuk menguasai perdagangan timah yang pada waktu itu sudah berada di tangan Bugis. Kekuatan Lanun di perairan Riau dan pantai timur Sumatra diperkuat lagi dengan didirikannya pangkalan daerah Reteh (antara muara sungai Jambi dan Indragiri). Menurut laporan yang di pemerintah Belanda, orang Lanun di Reteh mampu mengarahkan seribu tenaga laki-laki bersenjata. Ada 10-12 buah kapal, masing-masing berkurang 8 hingga 10 koyang (16-20 ton) dengan awak kapal 50-80 orang dan di per senjata dengan satu meriam kaliber besar di tambah dua meriam kaliber kecil. Dari pangkalan ini setiap tahun mereka merampok di perairan sekitar (Ilham, 2019:149).

Berdasarkan uraian di atas maka kondisi ekonomi politik pada zaman Sultan Mahmud Badaruddin II ialah merupakan gambaran tentang bagaimana ekonomi politik pada zaman itu. Dalam hal ini Sultan Mahmud Badaruddin mengambil sebuah keputusan untuk mengetahui perjalanan ekonomi politik pada saat itu. Dimana Ekonomi politik (Adam Smith) adalah *branch of science of a statesman or legislator* dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Sultan Mahmud Badaruddin juga mengambil sebuah keputusan dari situasi-situasi persaingan yang

berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Dengan ini Sultan Mahmud Badaruddin (*Public choice theory*) menggabungkan pendekatan ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam menganalisis perubahan kondisi politik dan ekonomi.

Setelah melihat situasi di selat Bangka yang begitu terancam oleh kekuatan perampok, Sultan Mahmud Badaruddin meminta bantuan kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg agar dapat mengirimkan bantuan pasukan Palembang di Bangka berupa beras, mesin dan peluru untuk memperkuat pertahanan di Bangka. Karena pada masa ini senjata dan mesiu merupakan barang yang dimiliki oleh pemerintah kolonial dan merupakan barang yang sangat mewah di Kesultanan Nusantara.

Paduka Sri Sultan Ratu mengirim utusan Kiai Demang Sura Darpa dan Kiai Ngabehi Anga Duta untuk menghadap kepada sahabat-sahabat Sultan yang sudah bagaikan saudara kandung, yaitu Gubernur Jenderal serta para anggota Dewan Hindia. dan kemudian pemberitahuan tentang Gubernur Jenderal Johannes Siberg telah menggantikan almarhum Mr. Pieter Gerardus Van Overstraten dan telah diangkat menduduki jabatan yang mulia itu, untuk memerintah di seluruh Hindi (Secret Diplomasi).

Sebagai mana yang telah di jelaskan di atas bahwa Paduka Sri Sultan Ratu dan Mr Pieter Gerardus Van Overstraten menjalin silaturahmi dan mempererat tali persahabatan serta memperkuat hubungan diplomasi yang saling menguntungkan maka Sultan Mahmud Badaruddin mengirim hadiah yang dibawa oleh Kiai Ngabehi Anga Duta dan Kiai Demang Sura Dara selain berupa

surat, hadiah yang dikirim juga bukan untuk Gubernur Jenderal saja tetapi juga untuk seluruh Dewan Hindia yang ada di Batavia.

Gubernur Jenderal dan para Dewan Hindia hadiah-hadiah berikut: dua pikul jagung, dua ribu potong gambir kualitas terbaik, dua buah taring gading gajah, dan dua buah tongkat rotan dengan pegangan emas, beserta juga kepada yang terhormat tuan Penasehat Utama dan direktur Jenderal: satu buah taring gading raja, seribu potong gambir kualitas terbaik, satu pikul jagung dan satu buah tongkat rotan dengan pegangan emas (Ilham, 2019:150).

Dalam hal ini berdasarkan ulasan diatas, Gubernur Jenderal bertujuan memberikan hadiah kepada Dewan Hindia untuk mempererat hubungan persahabatan antara Kesultanan Palembang dan Pemerintahan Belanda. Selain itu juga untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk dari Kesultanan Palembang selain lada dan timah.

Dengan adanya hubungan kerjasama antara Kesultanan Palembang dengan pemerintahan kolonial maka terjalinah suatu hubungan yang baik, maka dari itu pihak Kesultanan meminta bantuan bersenjata untuk mengamankan wilayah perairan di selat Bangka dan juga untuk menjaga hubungan perdagangan dengan pihak kolonial. Dari hasil yang dicapai dalam perjanjian ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Untuk wilayah yang dikuasai oleh perampok di Selat Bangka dan lautan di sekitar wilayah Kesultanan Palembang telah berhasil diamankan oleh pemerintah Belanda, dikarenakan pemasokkan timah yang dibutuhkan oleh

Belanda tidak bisa dijual dan hasil perjanjian ini tercapai dengan baik.

Kerjasama yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan berjalan dengan sesuai keinginan perlu diadakannya pendekatan dengan berbagai macam aspek agar dapat tercapainya suatu kesepakatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badarudin pada saat itu, yaitu melakukan sebuah pendekatan dari bidang ekonomi terhadap politik yang mana pendekatan dari (Adam Smith) ekonomi politik dapat mengetahui cara kerja untuk mendapatkan sebuah kesepakatan menggunakan ilmu yang dapat menelaah hubungan antara wilayah ekonomi dengan wilayah politik. Inti dari pendekatan ini adalah harus mempunyai konsep yang dipilih, konsep pilihan rasional yang mana konsep ini dapat memberikan keyakinan pada Sultan Mahmud Badaruddin saat mengambil sebuah keputusan dan konsep-konsep yang lebih efisiensi. Pertama-tama yang perlu di ketahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi ekonomi pada saat itu atau pendekatan ekonomi itu sendiri oleh karena itu Sultan Mahmud Badarudin mengambil pendekatan ekonomi politik.

Dalam hal ini Sultan Mahmud Badaruddin mengharapkan keputusan yang diambil dapat melakukan sebuah kesepakatan yang telah di sepati yaitu melakukan kerjasama dengan Gubernur Jenderal agar selama beliau berkuasa di Palembang Pemerintah Belanda dapat melindunginya dan memberikan bantuan karena kerjasama yang terjalin selama ini. Sultan juga meyakinkan bahwa kerjasama ini dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian Sultan juga memberikan jaminan tentang

perdagangan antara Kesultanan Palembang dan pemerintah Belanda tentang persediaan lada dan timah, Sultan juga akan sekuat tenaga menjamin ketersediaan tersebut demi kesejahteraan perekonomian antara kedua belah pihak.

Sri Sultan Ratu memberikan, mengenai perniagaan kompeni, yaitu di bidang lada dan timah, Paduka Sri Sultan dengan segala kekuatannya telah memerintahkan serta mendorong kawula nya, untuk memelihara produk-produk tersebut sesuai kemampuan mereka, oleh karena itu kesejahteraan kerajaan Palembang juga tergantung pada hal tersebut.

Sultan Mahmud Badaruddin II menjalin hubungan yang baik antara dirinya dengan Gubernur Jenderal. Dari kerja sama ini Sultan Mahmud Badaruddin dan Gubernur Jenderal berupaya untuk saling melindungi kepentingan masing-masing pihak yaitu keuntungan ekonomi yang mana Palembang menjamin ketersediaan lada dan timah, tetapi Palembang juga meminta perlindungan dari pemerintah kolonial untuk melindungi kepentingan Palembang dari ancaman pihak-pihak luar yang berusaha mengganggu kerja sama ini.

b. Pengelola Produk Lada

Dari hasil yang dicapai dalam diplomasi politik ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan Sultan Mahmud Badaruddin II telah bekerjasama dan perniagaan timah dan lada yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berjalan lancar dan aman. Kemudian hubungan ini juga dilakukan dengan pemberian hadiah yang dilakukan untuk mempererat kerjasama dengan pemerintah Belanda di Batavia.

Sultan Mahmud Badaruddin II juga mendapatkan wilayah kekuasaan yang telah di tentukan oleh pemerintah Belanda dengan batasan sungai dan dusun yang ada di pinggiran sungai menjadi “miliknya” .yaitu sungai Ogan 11 dusun, sungai Klakar 12 dusun, sungai Meranjang 6 dusun, sungai pulau Gawang 6 dusun, sungai Bangkula 5 dusun, sungai Rambang 26 dusun, sungai Lobu 10 dusun, sungai Neru 2 dusn, sungai Lematang 5 dusun, sungai Musi 1 dusun, sungai Blida 6 dusun, sungai Kramasan 1 dusun, dan lahan untuk para gembala kerbau, total semuanya mencapai 84 dusun (Ilham,2015:159).

Setelah mendapatkan wilayah kekuasaan tersendiri, maka Sultan Mahmud Badaruddin II dapat menjual dan melakukan dagang kopi dan sahang dengan menentukan harganya sendiri baik harga beli maupun harga jual dan juga Sultan dapat mengambil keuntungan yang besar tetapi Sultan juga dapat membayar pajak kepada pemerintah Belanda apabila memiliki uang lebih dari hasil penjualan tersebut.

Dari itu segala kuasa kerja yang Tuan Sultan Mahmud Badaruddin di atas itu tanah yang sudah jadi di belakang kali tuan Sultan pun punya barang dagangan lagi seperti sahang dan kopi itulah lain-lainnya dia punya harga tetapi inilah dan di ajari untung di atas itu barang-barang di belakang kali dan atau ambil di dalam tanah lain aturan pemerintah yang ikut orang kecil punya kerja, dia punya dagang-dagang dari dia punya segala barang-barang dari bagian rupa yang di belakang kali Tuan Sultan surat Raja tanah boleh ambil dia punya untung dari surat dia punya,

atau pajak dia boleh bayar dengan dia punya wang sahaja (Ilham, 2013:161).

Dalam hal ini pihak Kesultanan Palembang sangat dirugikan oleh pihak Belanda. Di karenakan setelah pemerintah Belanda memberikan wilayah kekuasaan, maka ada upaya untuk memberikan wewenang dalam ekonomi yang sangat terbatas bagi kehidupan keluarga Kesultanan. Dengan di batasinya wilayah kekuasaan Kesultanan maka hasil-hasil bumi yang di peroleh dari penjualan kopi dan sahang jelas tidak dapat membentuk atau memperkuat angkatan perang sendiri. Dikarenakan hasil penjualan produk-produk ini justru hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari di tabah lagi dengan alasan apabila penjualan kopi dan sahang mendapatkan keuntungan yang besar barulah boleh membayar pajak kepada pemerintah Belanda.

Dikarenakan adanya tekanan politik yang besar maka pihak Sultan Mahmud Badaruddin II harus dapat menjual degan murah produk sahang/lada dan kopi serta barang-barang lainnya dengan Pemerintah Belanda dengan harga yang sudah di tentukan oleh pihak Belanda inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penyeludupan dan tertutupnya pihak Kesultanan dalam melakukan perniagaan dengan pedagang lain bila di bandingkan dengan Belanda. Akibat dari kekangan inilah ekonomi di Kesultanan Palembang tidak stabil dan dapat memicu konflik.

Berdasarkan ulasan diatas maka pihak Kesultanan menerapkan sistem ekonomi terhadap suatu kebijakan yang di ambil berdasarkan konsep tentang kedaulatan konsumen (consumer sovereignty) yang artinya kebebasan mutlak dari konsumen untuk membuat pilihan penting yang di terapkan di

dalam bidang politik menjadi konsep dari kedaulatan dari individu-individu yang ada dalam organisasi-organisasi politik. Ekonomi yang di rancang pun juga harus membedakan antara kebijakan ekonomi yang di rancang harus dapat meningkatkan kebebasan memilih dan efisiensi dengan kebijakan ekonomi yang sudah di rancang untuk mempertahankan atau meningkatkan hak pada setiap individu.

Dengan diambilnya suatu kebijakan yang di terapkan oleh Kesultanan Palembang maka setiap individu-individu harus dapat meningkatkan roda perekonomian di setiap daerah, maka dari itu Kesultanan Palembang menjadi pusat perdagangan oleh karena itu pihak Kesultanan mendapat julukan *net indsiche venitie*. Bahkan nama dari *Darussalam* di terjemahkan *de stad desh vredes* yang berarti tempat yang tenteram. Gambaran ini di kemukakan oleh Mayor M.H Court yang dikutip oleh (Djohan Hanafiah 1996:48-49)

Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang melayu, Palembang telah membuktikan dan terus secara saksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling baik, seperti yang dinyatakan pada orang--orang pribumi dan orang-orang Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu kecil dengan kewaspadaan yang biasa dan tindakan-tindakan pencegahan yang akan mengamankan dari kekerasan dan perampas. Di bagian luar sungai perahu-perahu kecil perampok setiap saat bersembunyi di dalam *suak* (anak-anak sungai kecil) dan terhitung di bawah hutan sepanjang pantai akan mangsa perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, tetapi hal ini

jarang terjadi karena dijaga oleh kekuatan Sultan dengan segala peralatan.

Berdasarkan kondisi dan situasi ini pelabuhan di wilayah Kesultanan Palembang melakukan pelayanan di bidang dagang sudah semakin membaik, sehingga mempunyai citra tersendiri. Tidak perlu diragukan lagi prasarana dan sarana perdagangan lokal maupun internasional di dalam Kesultanan Palembang tersebut. Di samping itu komoditas yang diperlukan oleh dunia perdagangan internasional adalah Lada dan Timah.

Perdagangan antara dua negara yang di dasarkan pada keunggulan absolut. Ketika satu negara lebih efisien dari pada atau memiliki keunggulan absolut atas yang lain dalam produksi satu komoditas tetapi kurang efisien dari pada atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara lain dan memproduksi komoditas yang kedua, kedua negara dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing khusus dari dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut.

Komoditas keduanya tersebut merupakan primadona di Kesultanan Palembang. Meski pun Kesultanan telah terikat monopoli perdagangan dengan VOC (*Verrenigde Oost Indische Compagnie*) akan tetapi permintaan pasar sangat meningkat. Meningkatnya pasar lada, diakibatkan oleh permintaan pasar yang tinggi, bukan hanya di pasar Eropa permintaan juga meningkat di pasar Cina (Hanafiah 1996:51 dalam Raviko,2013:46).

Dengan meningkatnya permintaan menimbulkan “Pasar bebas“ pihak Kesultanan dengan bebasnya menjual lada ke Kerajaan-Kerajaan dan termasuk di kolonial Inggris tanpa adanya

Interpensi dari serikat dagang Belanda dan VOC. Akibatnya dengan adanya pasar bebas tersebut produksi penjualan lada ke Belanda mengalami penurunan. Menurut (Williyam Marsden) lada yang dijual ke VOC hanya mendapatkan 2000 pikul, sementara itu, menurut catatan residen Palembang, penjualan lada ke Makau (Cina) di taksir mencapai 20.000 pikul (Hanafiah, 1996:52 dalam Raviko, 2013:46).

Selain lada komoditas ekspor sebagai pemasok keuangan kesultanan Palembang adalah timah. Pulau Bangka adalah pusat industri timah paling awal. Tahun 1722 VOC membeli timah untuk menjual ke Eropa untuk membujuk Sultan agar timah menjadi perdagangan monopoli dan kesepakatan di bentuk dengan perjanjian kontra. Perdagangan monopoli yang dilakukan oleh VOC menggambarkan suatu keadaan di mana terdapat seorang atau sekelompok yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak. Tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ambil bagian (Roviko, 2013:49).

Monopoli (Sukirno, 2009:266) diartikan sebagai suatu hak yang istimewa (*previlege*) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya akan menciptakan suatu penguasaan pasar. Menurut teori ini monopoli murni (*pure monopoly*), yang di mana terjadi satu perusahaan tak menghadapi persaingan. Perusahaan-perusahaan tidak bisa dipengaruhi harga (*price-taker*). Artinya penjualan barang yakin bahwa mereka dapat menjual barang sebanyak mungkin yang mereka hendaki dengan harga yang berlaku, dan tak dapat mereka hendaki harga yang mereka terima atas produk yang mereka jual (Krugmen dan Obstfeld, 2002:150-151 dalam Raviko, 2013:49).

Namun monopoli yang terjadi di masa Kesultanan Palembang yang coba diterapkan oleh VOC tampaknya bukan monopoli murni. Pada kenyataannya VOC dalam melakukan perdagangan internasionalnya di Kesultanan Palembang mendapatkan persaingan. Ini artinya walaupun VOC telah melakukan kontrak monopoli lada dan timah namun jumlah dagang yang diperoleh lebih kecil bahkan mendapat persaingan dari Cina dan Kesultanan Riau (Teguh, 2010:67).

Jika dilihat apa yang dilakukan oleh VOC sudah melanggar struktur ekonomi monopoli murni, di mana seharusnya tidak mendapatkan persaingan perdagangan internasional namun itu tidak dipengaruhi komoditas dagang di Kesultanan Palembang itu sendiri. Terbentuknya dagang/pasar bebas, menimbulkan kesenjangan antara VOC dan kesultanan Palembang. Penjualan rimah dan lada yang diterima VOC lebih sedikit dari Cina dan Kesultanan Riau. Upaya memperoleh monopoli murni atas kedua komoditas tersebut, VOC terus menekan Kesultanan Palembang. Kemudian dibuatlah perjanjian dagang antara kolonial Belanda dengan kesultanan Palembang.

Pada akhirnya, sekalipun perjanjian antara Kesultanan dengan kolonial sudah berlangsung lama, hal itu dilakukan sebelum terjadi pengakuan secara formal dan biasanya Sultan tidak kehilangan kedaulatannya. Menjelang akhir abad ke 19, penguasa kolonial Belanda mencoba menyingkirkan peran Sultan dalam bidang ekonomi, baik melalui perjanjian damai maupun melalui ancaman militer.

Berdasarkan permasalahan di atas maka ekonomi politik pada masa Kesultanan Palembang mengalami sebuah konflik.

Konflik itu lah yang dapat mempengaruhi kesenjangan perekonomian politik pada masyarakat, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin di karenakan adanya pembajakan yang terjadi di daerah Bangka (pertambangan Timah) yang di pimpin oleh orang-orang dari Lanun Kalimantan Utara yang berpusat di Teluk Marudu dan daerah Tempasuk akibatnya Kesultanan Palembang mengalami kerugian dan merosotnya nilai dagang yang terjadi pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin II

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang di dapat, Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian pada saat itu, setiap keputusan yang diambil oleh Sultan Mahmud Badaruddin wajib mentaati setiap keputusan yang diambil, agar dapat mensejahterakan masyarakat, semua produk-produk yang berasal dari petani atau pun pertambangan Timah dan lada harus mendapatkan persetujuan dari Sultan Mahmud Badaruddin untuk penjualan produk yang di hasilkan.

Dalam hal ini Sultan Mahmud Badaruddin mencoba menerapkan sistem teori yang di kemukakan oleh Adam smith adalah ekonomi politik di pandang sebagai satu cabang ilmu untuk negarawan maupun legislator, memiliki dua tujuan yang khas yaitu: Untuk meningkatkan pendapatan atau subsistensi bangsa atau secara lebih tepat untuk memungkinkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh bangsa.

Terkait dengan ekonomi politik, Kesultanan Palembang juga mendapatkan tekanan dari kolonial Belanda yang mana sudah di sepakati oleh kedua belah pihak untuk produk-produk dari Kesultanan Palembang seperti Timah dan Lada harus di jual pada pihak kolonial Belanda dengan harga yang murah. Akibatnya perekonomian pada saat itu tidak stabil dan memicu kesenjangan antara Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda.

Kesepatanan antara Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda juga menyimpulkan pergolakan politik, karena pada saat itu monopoli yang terjadi atau yang coba di terapkan oleh VOC tampaknya bukan

monopoli murni, pada kenyataannya Kesultanan Palembang masih mendapatkan persaingan dari Cina dan Kesultanan Riau serta mendapatkan penghasilan kecil dari penjualan semua produk-produk memiliki harga yang rendah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pihak Kolonial Belanda.

B. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini di antara lain adalah :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan sejarah ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin periode 1804-1812. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Kesultanan Palembang .
2. Kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat kiranya lebih banyak membaca literature-literatur yang berkenaan dengan ekonomi politik pada masa Sultan Mahmud Badaruddin periode 1804-1812 serta mencari informasi sejarah Kesultanan Palembang lebih dalam bagi mahasiswa, pelajar serta masyarakat yang membaca karya ilmiah.
3. Semoga skripsi ini bisa membantu mahasiswa untuk menjadikan skripsi ini sebagai referensi tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahmudi, *konsep ekonomi politik dalam perspektif Ibnu Kaldun dan Karl Marx*, Yogyakarta, 2013.
- Dedy Irwanto, Venesia dari Timur: *Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Hanafiah, Dhojan, 1989. *Kuto Besak; Upaya Kesultanan Palembang menegakkan kemerdekaan*. Jakarta : Haji Masa agung.
- A. Dahlan, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: TP, 1981
- Harun Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995
- James A. Caporaso , David P. Levino, *Teori-teori ekonomi politik*, Yogyakarta, 2015.
- Mardanas Safwan. *Sultan Mahmud Badaruddin II (1767-1852)*. Jakarta :PT. Mutiara Sumber Wijaya, 2004
- Nawiyanto, dkk.2016. *Kesultanan Palembang Darussalam*. Jember: Jember University Press.
- R.H.M Akib, *Sejarah Palembang*, (Palembang: Pidato Dies. APDN, 1969)

Jurnal

- ANRI .Bundel Palembang no 62.2 Veth 1867 ; 654
- Endang Rochmiatun, *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskahnaskah Kontrak Sultan Palembang*.
- Farida. *Sejarah Perekonomian Kesultanan Abad XVII hingga Awal Abad XIX*.Artikel di akses pada 15 april 2020 dari

135<http://eprints.unsri.ac.id/2358/2> Daftar_Isi_dan_isi Lontar
Edisi Januari Juni_2009.pdf

Farida (2009) *Perekonomian Kesultanan Palembang*. Jurnal Sejarah Lontar, 6 (1). pp. 12-20. ISSN 1693-758

Farida (2012) *Perang Palembang dan Benteng-Benteng Pertahanannya*. In: Palembang : Masa lalu, masa kini, dan masa depan. UNSRI Press, Universitas Sriwijaya, pp. 57-64. ISBN 979-442-X

Habiburrahman, *Sultan Mahmud Badaruddin III*. UIN Raden Fatah Palembang. 2016

Ilham, Muhammad, *Diplomasi politik Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda berdasarkan surat-surat melayu abad ke 19*, Palembang, 2015

Juliansyah. Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis,Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011.

Marsden, William. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

Moh. Qudsi Fauzi, *konsep ekonomi politik dalam perspektif Ibnu Khaldun*, Universitas Airlangga, 2019

Mohammad Syawaludin, *Analisis sosiologi terhadap sistem pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam*, UIN Raden Fatah Pelambang, 2014

Maherul. Mursal, 2020, *Mengenal Ekonomi Politik: Definisi, Posisi Negara, dan Pasar*, Universitas of Indonesia

Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darusalam : sejarah dan warisan budayanya*, Universitas Jember, 2018.

Qibtiyah. Mariatul, *Stratikasi Social Dan Kepercayaan (Analisis Atas Fenomena Makan Di Kota Palembang)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Raviko, *konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821*, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Raden Fatah Palembang, 2013

Sani, Amilda dkk. 2010. *Ekspedisi Sriwijaya Palembang* : Balai Arkeologi Palembang.

Internet

Afrizal. *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*. artikel diakses pada 17 april 2020 melalui <http://repository.unand.ac.id/2225/>.

<https://eprints.uny.ac.id/18194/4/4140580001%20BAB%20II.pdf> di akses pada 13 januari 2021

<https://docplayer.info/41294195-Bab-ii-kesultanan-palembang.html> di akses pada 11 januari 2021

<http://digilib.unimed.ac.id/17555/3/6.%20NIM.%20071233210010%20Bab%20I.pdf> di akses pada tanggal 21 maret 2021

<https://alihamdan.id/sejarah-kota-palembang/> pada 20 maret 18:25.

<http://eprints.ums.ac.id/59653/7/BAB%20II.pdf> / pada 25 maret 14:36.

<https://eprints.uny.ac.id/18149/3/BAB%20I%2008.07.021%20Fer%20p.pdf> pada 22 juni 2021.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41648/2/MARIATUL%20QIBTIYAH.pdf> pada 22 juni 2021



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.Y.27/Un.09/VIII/PP.01/03/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Imroatul Azizah*, tanggal 22 Mei 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP.E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.Si.	197109132000031003	Pembimbing I
Mariyatul Qibthyah, MA.Si.	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Imroatul Azizah

N I M : 1657020047

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Ekonomi Politik Palembang Pada Masa Sultan Mahmud Badarudin II Periode Kekuasaan 1804-1812."

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 15 Maret 2021 s/d 15 Maret 2022

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Tersusun:

1. Rektor
2. Dosen Pembina Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Asy -



Palembang, 15 Maret 2021

Dr. n.

Dr. Dr. Izromiddin, MA

NIP. 196206201988031001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR - 3 DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@ yahoo.co.id

Palembang, 11 Juni 2021

Nomor : 070/1516/BAN.KBP/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-844/ Un.09/VIII/TL.01/06/2021 Tanggal 04 Juni 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa:

No	Nama	NIM	Judul Skripsi
1	Inroatul Azizah	1637020047/ Ilmu Politik	Ekowani Politik Palembang Pada Masa Sultan Mahmud Badarudin Periode Kebhianan 1802-1812

Untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data

Masa berlaku selama: 11 Juni 2021 s.d 11 September 2021

Dengan Catatan:

1. Sebelum melakukan penelitian/pengambilan data/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/pengambilan data/observasi/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/pengambilan data/survey/riset agar dapat menaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/pengambilan data/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/pengambilan data/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/pengambilan data/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperutnya.

dan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS BADAN,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
2. Mahasiswa Ybs



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Merdeka Nomor 74 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 353522,367486 faksimile, ext. 103 Kode Pos 30131
e-mail : bappeda_palembang@yahoo.co.id Website : www.bappeda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 030 / 1662 / BappLitbang - Litbang / VI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Harrey Hadi, MS
Nip : 196507141995031001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV. c
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
Instansi : Bappeda Litbang Kota Palembang

Dengan ini Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Imroatul Azizah
Nim : 1657020047
Institusi/Pendidikan : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas : Ilmu Politik
Topik Penelitian : Ekonomi Politik Palembang pada masa Sultan Mahmud Badarudin Periode Kekuasaan 1802-1812

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengambilan Data serta telah selesai melaksanakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 16 Juni 2021



Ir. H. Harrey Hadi, MS
Pembina Utama Muda
Nip. 196507141995031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang
2. Mahasiswa Ybs



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. KH.ZainalAbidinFikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Imroatul Azizah
Nim : 1657020047
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Ekonomi politik Palembang pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II (Periode kekuasaan 1804-1812)
Pembimbing I : Taufik Akhyar, M.Si.

No.	Hari/ tanggal	Permasalahan yang Dikonsultasikan	Paraf
1	15-05-2021	- Pembacaan proposal	[Signature]
2	20-05-2021	- Latar belakang vs. Abstrak	[Signature]
3	25-05-2021	- Teori-teori yang relevan	[Signature]
4	04-06-2021	- Hasil/temuan penelitian	[Signature]
5	15-06-2021	- Kesimpulan	[Signature]
6	24-06-2021	- Aneka	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. KH.ZainalAbidinFikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Imroatul Azizah
Nim : 1657020047
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Ekonomi politik Palembang pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II (Periode kekuasaan 1804-1812)
Pembimbing II : Mariyatul Qibtiyah, MA,Si

No.	Hari/ tanggal	Permasalahan yang Dikonsultasikan	Paraf
1	17-11-2020	Segeza Perbaiki sekta Uluat kolom komentar	[Signature]
2	30-11-2020	Saya selaku dosen memberikan Acc untuk pembuatan sk pembimbing lanjut BAB 2	[Signature]
3	25-01-2021	Revisi, Uraikan nanti njamin revinye dari bab 1	[Signature]
4	08-03-2021	Revisi sesuai kolom komentar, perhatikan eyd dan typo penulisan	[Signature]
5	21-05-2021	lanjut bab 3,4 rapikan lagi format penulisan	[Signature]
6	19-05-2021	Revisi lagi	[Signature]
7	26-05-2021	Revisi lagi khususnya analisisnya	[Signature]
8	04-06-2021	Tambahkan lagi pembahasannya khusus analisisnya, di bagian analisis itu mix kan antara teori dan teori Acc, dan lanjut kompre	[Signature]
9	14-06-2021		[Signature]
10	25-06-2021		[Signature]



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI





Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Imroatul Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Ekonomi politik Palembang Sultan Mahmud Badarudin II periode kekuasaan (1804-1812)*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Pembimbing I	
2	Mariyatul Qibtiyah, MA, Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.	Penguji I	
4	Ryllian Chandra, MA.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Ketua

Dr. Taufik Akhvar, M.Si.
NIP. 197101932000031003

Sekretaris

Raegen Harahap, MA.
NIDN. 2011059202



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Imroatul Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Ekonomi politik Palembang Sultan Mahmud Badarudin II periode kekuasaan (1804-1812)*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 3 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Taufik Akhyar, M.Si.
NIP. 197101932000031003